



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor        Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 32);
  9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 03);
  12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai perwujudan komitmen daerah.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah sebagai proses perencanaan berbasis aspirasi masyarakat.
9. RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
11. Satuan Kerja adalah bagian/unit Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah.
12. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Pagu Indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

## BAB II

### POKOK – POKOK PENYUSUNAN

## PASAL 2

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - BAB I     Pendahuluan
  - BAB II    Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
  - BAB III   Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
  - BAB V     Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - BAB V     Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - BAB VI    Penutup
- 3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PASAL 3

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2017.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Instrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.

## PASAL 4

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017, berpedoman pada RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## PASAL 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada Tanggal 01 Agustus 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

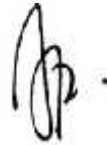
Diundangkan di Manna  
pada tanggal 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**ttd**

RUDY ZAHRIAL, SE  
NIP. 196310011988031008

*BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 13*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2016**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu 1). Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2). Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3). Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan 4). Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periodisasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021. Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi momentum terwujudnya visi dan misi serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga berdampak nyata pada semakin meratanya pembangunan disegala bidang terutama kesehatan, pendidikan dan pertanian sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dari bulan Januari sampai dengan awal Bulan Februari 2016. Selanjutnya dilaksanakan Forum SKPD Kabupaten pada Minggu Ketiga Bulan Maret 2016 dan kemudian untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 28 Maret 2016. Hasil Kesepakatan dari Musrenbang Kabupaten dan usulan APBD Provinsi dan APBN tahun 2016 akan menjadi bahan pembahasan pada Musrenbang Provinsi Bengkulu dan Musrenbang Nasional yang diselenggarakan pada bulan April 2016.

Adapun tahapan penyusunan RKPD yaitu: tahap pertama: persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua: penyusunan rancangan awal RKPD dimana

didalamnya terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan; yaitu tahap perumusan rancangan awal RKPD dan tahap penyajian rancangan awal RKPD. Tahap ketiga: Penyusunan Rancangan RKPD yang meliputi perumusan rancangan RKPD yang didalamnya dilakukan evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dilanjutkan penyajian rancangan RKPD. Tahap keempat: Musrenbang RKPD. Tahap kelima: perumusan rancangan akhir RKPD dan Tahap keenam: penetapan RKPD.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
  16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
  17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor 03);
  21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor 30) .

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:

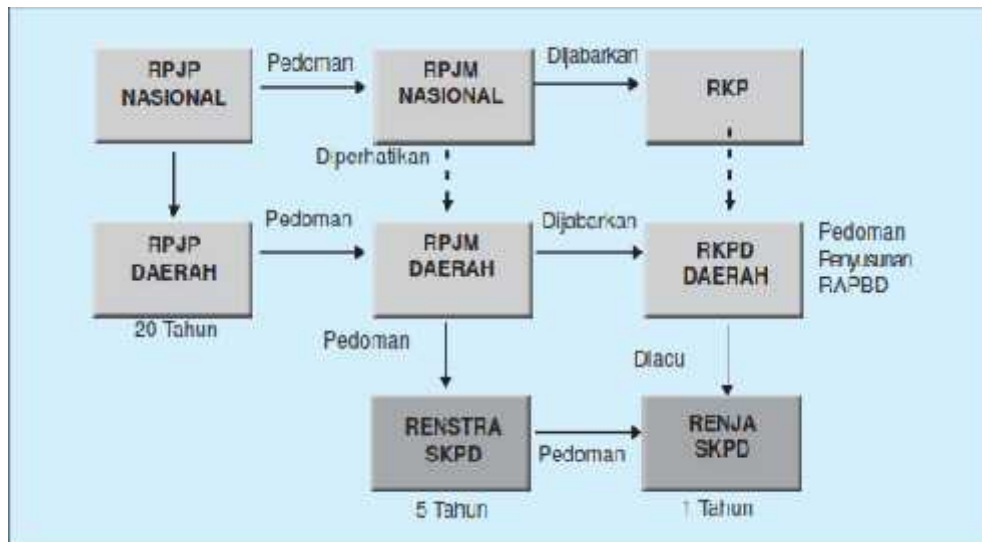
1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJP Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Provinsi Bengkulu, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut agar tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya;
2. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RKPD



merupakan penjabaran dari RPJMD atau dengan kata lain penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga sasaran dan prioritas pembangunan selama 6 (lima) tahun dapat tercapai secara optimal.

Hubungan atau keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar Dokumen**



#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

##### BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

##### BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, serta menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sebagai bahan acuan perencanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Bengkulu Selatan, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan daerah.

##### BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

**BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan yang disajikan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

**Bab VI. Penutup**

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017.

**1.5. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Fungsi dan Tujuan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA S/KPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi memberikan gambaran mengenai kondisi daerah yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km<sup>2</sup>. Kemudian pada Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran yang ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan pasca pemekaran seluas 1.185,70 km<sup>2</sup> atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km<sup>2</sup> atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 156.970 ha atau 1.569,70 km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Bengkulu Selatan cukup strategis, karena Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada jalur lintas yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan (melalui Tanjung Sakti). Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah timur dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia

##### 2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis terletak pada 4<sup>0</sup> – 5<sup>0</sup> LS dan 102<sup>0</sup>–103<sup>0</sup> BT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari daerah datar dan berbukit. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas: daerah yang berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl seluas 6,23%, pada ketinggian 25 - 100 m dpl seluas 44,71 %, pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 34,89%, pada ketinggian 500 – 1000 m dpl dengan luas 8,10%, pada ketinggian > 1000 m dpl dengan luas 6,07%.

**Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bengkulu Selatan**



Dilihat dari tekstur, tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) Tahun 2015, luas daerah menurut tekstur tanah, yaitu :

- Tekstur halus seluas 83.120 Ha atau 70,08 %
- Tekstur sedang 18.875 Ha atau 15,91 %
- Tekstur agak kasar 16.615 Ha atau 14,01 %

Kemiringan tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan bervariasi, yaitu: wilayah yang mempunyai kemiringan 0 – 15 derajat seluas 45,86 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan, wilayah yang mempunyai kemiringan 15 - 25 Derajat seluas 39,66 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 derajat seluas 10,46 %, wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 derajat seluas 4,02 %,

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sungai besar dan kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sungai tersebut antara lain: Air Manna, Air Bengkenang, Air Kedurang, Air Nelengau, Air Nipis, Air Pino, Air Manna Hijau dan Air Selali. Sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM.

Suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu rata-rata maksimum antara 30°C - 33°C dan suhu rata-rata minimum 22°C - 23°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata relatif antara 80-90%.

Iklim terbentuk oleh unsur-unsur cuaca, yaitu curah hujan, hari hujan, radiasi surya, penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Besarnya unsur-unsur pembentukan iklim dapat diuraikan sebagai berikut: menurut kriteria Schmid dan Ferguson dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim A, menurut kriteria Mohr, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim 1a, menurut kriteria Oldeman, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim B1, menurut kriteria Koppen, dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim Af.

### 3. Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan rencana distribusi peruntukkan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya.

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu (dalam RTRWP Bengkulu), kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun taman nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, saat ini telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan maupun perubahan fungsi ruang yang ada saat ini merupakan kawasan lindung, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun review atau pengajuan peninjauan kawasan hutan di dalam RTRWP Provinsi Bengkulu yang terkait dengan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan**  
**Di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Nama Kawasan Hutan	Luas Kawasan (Ha)	Usulan Perubahan (Ha)	Rekomendasi Perubahan (Ha)
1.	HL. Raja Mandara Reg. 32	20.727		
2.	HL. Bukit Riki Reg. 32A	4.370	APL 519	Tidak di ubah
3.	HL. Bukit Sanggul Reg. 37	7.982		
4.	HPT. Bukit Rabang Reg. 78	4.216.54	Tahura 101 Ha	Tahura 101 Ha
5.	HPT Peraduan Tinggii Reg. 79	9.158.42	APL 4.785	Tidak di ubah
6.	HPT. Air Keduran Reg. 81	1.192		
7.	HP. Air Bengkenang Reg 80	1.579	APL 1.927	APL. 222 Ha HP. 13537 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang peruntukan ruangnya untuk fungsi lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan yang peruntukannya untuk hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Struktur ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan direncanakan untuk rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten dengan tujuan dasar agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.



Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2030 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2030**

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Manna (Kecamatan Kota Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemerintahan</li> <li>• Pusat Perdagangan dan jasa</li> <li>• Pusat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan.</li> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga</li> </ul>
2.	Pasar Bawah (Kecamatan Pasar Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Pengembangan sub sektor Perikanan</li> <li>• Industri pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga</li> </ul>
3.	Kayu Kunit (Kecamatan Manna)	PKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Pertambangan (golongan c)</li> <li>• Perkebunan dan sub sektor pertanian</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Indutri pertanian dan pengolahan rumah tangga.</li> </ul>
4.	Masat (Kecamatan Pino)	PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Agro Industri</li> <li>• Pusat Agropolitan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Permukiman perdesaan</li> </ul>
5.	Simpang Pino (Kecamatan Ulu Manna)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kawasan Hutan Konservasi</li> <li>• Perternakan</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Permukiman perdesaa</li> </ul>
6.	Lubuk Ladung (Kec. Kedurang Ilir)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian</li> <li>• Agroindustri</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Perikanan</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>
7.	Gindo Suli (kec. Bunga Mas)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pariwisata buatan</li> <li>• Industri pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>
8.	Tanjung Negara (Kec. Kedurang)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kawasan hutan konservasi</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Perikanan darat</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>
9.	Pasar Baru (Kec. Seginim)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan</li> </ul>

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan darat</li> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>
10.	Suka Negeri (Kec. Air Nipis)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kehutanan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Perikanan darat</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>
11.	Pasar Pino (Kec. Pino Raya)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Perikanan</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Kehutanan</li> <li>• Permukiman pedesaan</li> </ul>

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

## B. Potensi Pengembangan Wilayah

### 1. Pertanian

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup besar dan menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Sektor Pertanian khususnya pertanian bahan makanan merupakan komoditi penyumbang PDRB yang paling tinggi sebesar Rp. 150.043.420,000,-. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menopang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2013 sebagaimana data dari BPS Kabupaten Bengkulu Selatan yang terangkum dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2014 tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 11.291 Ha dengan produksi sebesar 76.708 ton.

### 2. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat luas dan menjadi potensi daerah yang potensial untuk terus dikelola dan dikembangkan, relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit dimana produksi pada tahun 2013 sebesar 144.704,47 ton, kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe.

### 3. Pertambangan dan Industri

Di bidang pertambangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi bahan galian pertambangan yang prospeknya cukup baik untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, sebagai penopang sumber perekonomian daerah. Namun dari potensi yang ada tersebut, sampai saat ini baru beberapa potensi pertambangan yang dieksploitasi dan itu pun masih termasuk kategori bahan galian yang kecil seperti batu sarak/batu tulis dan batu gamping. Kedepan diharapkan potensi-potensi yang masih terkandung di dalam perut bumi Sekundang Setungguan dapat dieksploitasi dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang maju, mandiri dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Beberapa potensi bahan galian pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Bahan Galian/ <i>Minings</i> (1)	Lokasi/ <i>Location</i> (2)
1. Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang
2. Batu Sarak/ Batu Tulis	Disekitar Air Bengkenang, Hulu air Luwangan Pematang Gaung Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3. Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4. Posphat Guano	Gua dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5. Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6. Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7. Andesit	Bukit Raja Mendara (2000 Ha)
8. Marmer ( <i>Marble</i> )	Desa Sukarami Kec. Seginim
9. Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10. Batu Rijang (Radio Laria Chert)	Hulu Air Bengkenang
11. Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12. Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masar
13. Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14. Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15. Pasir Besi	Pantai Selali, Pantai Sulau
16. Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

*Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015*

#### 4. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan sangat besar sekali baik itu perikanan laut maupun perikanan darat. Khusus untuk perikanan laut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mampu memproduksi yaitu Kecamatan Pasar Manna, Kedurang Ilir dan Pino Raya. Sedangkan untuk produksi perikanan darat tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan namun produksi terbesar untuk perikanan darat terdapat di Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim.

#### 5. Peternakan

Potensi Kabupaten Bengkulu Selatan pada sektor peternakan cukup menjanjikan karena populasi ternak cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berbagai jenis ternak. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan produksi peternakan merupakan salah satu faktor penyumbang yang potensial meskipun bukan merupakan faktor yang utama. Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar



diusahakan oleh masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis ternak yang paling banyak adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik.

## 6. Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Bengkulu Selatan kaya akan bermacam potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi daerah, diantaranya keberagaman budaya dan agama. Keberagaman yang ada tersebut diikat dalam hubungan sosial yang baik dan harmonis. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat saling membantu, bekerja sama dan bahu-membahu terutama pada prosesi 3 (tiga) siklus kehidupan manusia yaitu pada saat kelahiran (*aqiqah*), perkawinan (*walimatul ursy*) dan kematian (*takziah*). Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai macam suku seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Nama Suku	Persentase (%)
1	Serawai	76,87
2	Pasemah	13,39
3	Jawa	2,89
4	Minangkabau	2,21
5	Melayu lainnya	1,06
6	Sunda	0,95
7	Batak	0,73
8	Lainnya	1,89

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, 2015

Keberagaman suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi embrio munculnya beraneka macam kekayaan budaya dalam bentuk seni tradisi maupun adat istiadat yang apabila dikemas dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah. Beberapa kekayaan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kekayaan Budaya (Tari-tarian dan Adat Istiadat)**  
**di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Tari – Tarian	Adat Istiadat
1	Tari Sekapur Sirih	Seni Bedindang Mutus Tari
2	Tari Napa	Dundang Padi
3	Tari Rawas	Bimbang Adat
4	Tari Kain	Acara Kayiak Nari
5	Tari Piring	Berzanji
6	Tari Payung	Malam Gegerit
7	Tari Berempat	Padu Padan Kulau
8	Tari Setangan	
9	Tari Mak Inang	
10	Tari Andun	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Bengkulu Selatan, 2015

## 7. Pariwisata

Di bidang kepariwisataan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu potensi yang mampu memberikan *value added* bagi daerah sehingga akan dapat menjadi media promosi bagi daerah agar dikenal baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan internasional. Tentunya apabila potensi wisata ini dikembangkan secara maksimal akan mampu menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam, yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung sektor perekonomian juga akan menggeliat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

**Tabel 2.6**  
**Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Nama Lokasi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
4	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
5	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
6	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
7	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
8	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
9	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
10	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
11	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
12	Kolam Renang Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
13	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
14	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
15	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
16	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
17	Telaga Rajak Besi	Kedurang
18	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
19	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
20	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
21	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
22	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
23	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

### C. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi dan sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana, diantaranya menetapkan strategi penyusunan mitigasi bencana dengan arah kebijakan antara lain meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

### D. Demografi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Manna	Kayu Kunit	33,17	2,80
Bunga Mas	Gindo Suli	35,08	2,96
Kota Manna	Kota Medan	32,16	2,71
Pasar Manna	Pasar Bawah	5,84	0,49
Kedurang	Tanjung Negara	234,55	19,77
Kedurang Ilir	Lubuk Ladung	58,20	4,91
Seginim	Pasar Baru	61,52	5,19
Air Nipis	Suka Negeri	203,28	17,14
Pino	Masat	61,88	5,22
Ulu Manna	Simpang Pino	236,92	19,97
Pino Raya	Pasar Pino	223,50	18,84
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>1.186,10</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 150.601 jiwa, dimana 75.771 jiwa laki-laki dan 74.830 perempuan. Laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 1,46%. Adapun jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan**

Kecamatan	Penduduk			Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	6.811	6.889	13.710	98,72
Kota Manna	14.749	14.881	29.630	99,11
Kedurang	5.337	5.173	10.510	103,17
Bunga Mas	3.024	3.033	6.057	99,70
Pasar Manna	9.076	9.232	18.308	98,31
Kedurang Ilir	3.962	3.815	7.777	103,85
Seginim	7.911	7.697	15.608	102,78

Air Nipis	5.428	5.276	10.704	102,88
Pino	5.799	5.732	11.531	102,88
Pino Raya	9.803	9.460	19.263	103,63
Ulu Manna	3.871	3.632	7.503	106,58
<b>Jumlah</b>	<b>75.771</b>	<b>74.830</b>	<b>150.601</b>	<b>101,26</b>

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

## A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga konstan.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu. Dalam hal ini penilaian terhadap produksi, biaya antara ataupun nilai tambahnya dilakukan dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Pada harga berlaku jika dilihat dari series perkembangan PDRB/pendapatan regional dapat diartikan suatu perkembangan yang disebabkan oleh peningkatan produksi, tetapi juga karena meningkatnya harga barang. Oleh karena itu penyajian atas dasar harga berlaku tersebut masih dipengaruhi oleh adanya faktor inflasi atau deflasi

**Tabel 2.8**  
**PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	403.030,19	32,99	437.614,97	31,69	476.038,52	30,78	518.038,98	29,66	1.367.309,3	43,03
2. Pertambangan & Penggalian	3.609,35	0,30	3.918,99	0,28	4.264,08	0,27	4.595,17	0,26	99.737,87	3,13
3. Industri Pengolahan	17.510,55	1,43	20.642,49	1,50	23.262,94	1,50	26.688,61	1,53	103.617,26	3,26
4. Listrik, Gas & Air Bersih	2.251,34	0,18	2.450,23	0,18	2.560,86	0,17	3.003,75	0,17	1.831,64	0,057
5. Konstruksi	54.102,34	4,43	61.578,69	4,46	70.162,73	4,54	79.776,38	4,57	190.244,07	5,99
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	301.925,51	24,71	338.248,01	24,50	378.546,05	24,48	423.221,56	24,24	521.319,65	16,41
7. Pengangkutan & Komunikasi	98.286,13	8,05	115.960,35	8,40	134.414,67	8,69	152.147,23	8,71	181.214,52	5,70
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	54.853,11	4,49	61.602,86	4,46	69.351,20	4,48	77.814,41	4,45	216.584,02	6,82
9. Jasa-Jasa	286.061,63	23,42	338.723,24	24,53	393.533,34	25,45	460.393,70	26,36	247.836,2	7,80
<b>PDRB</b>	<b>1.221.630,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.739,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.546.323,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.746.216,79</b>	<b>100,00</b>	<b>3.177.530,73</b>	<b>100,00</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>1.221.630,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.739,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.546.323,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.746.216,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan.

**Tabel 2.9**  
**PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Menurut Lapangan Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	179.004,61	31,39	187.721,99	30,90	197.452,86	30,54	207.754,08	30,17		
2. Pertambangan & Penggalian	1.704,80	0,30	1.812,14	0,30	1.929,07	0,30	1.972,08	0,28		
3. Industri Pengolahan	8.687,65	1,52	9.471,25	1,56	10.156,67	1,57	11.115,70	1,61		
4. Listrik, Gas & Air Bersih	848,94	0,15	874,64	0,14	896,27	0,14	959,93	0,14		
5. Konstruksi	28.001,48	4,91	30.321,17	4,99	33.076,77	5,12	34.905,89	5,07		
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	151.747,00	26,61	160.602,61	26,44	168.829,69	26,12	179.411,83	26,06		
7. Pengangkutan & Komunikasi	45.138,56	7,91	48.745,16	8,02	52.410,29	8,11	56.532,64	8,21		
8. Keu. Real Estat, & Jasa Perusahaan	28.112,80	4,93	30.234,13	4,98	32.448,69	5,02	34.498,57	5,02		
9. Jasa-Jasa	127.060,64	22,28	137.658,47	22,66	149.259,58	23,08	161.438,31	23,44		
<b>PDRB</b>	<b>570.306,48</b>	<b>100,00</b>	<b>607.441,56</b>	<b>100,00</b>	<b>646.459,89</b>	<b>100,00</b>	<b>688.589,02</b>	<b>100,00</b>		
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>570.306,48</b>	<b>100,00</b>	<b>607.441,56</b>	<b>100,00</b>	<b>646.459,89</b>	<b>100,00</b>	<b>688.589,02</b>	<b>100,00</b>		

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

## 2. Laju Inflasi

Selama kurun waktu tiga tahun, laju inflasi rata-rata di Provinsi Bengkulu sebesar 8,46%, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Laju Inflasi Rata-Rata Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2012-2014**

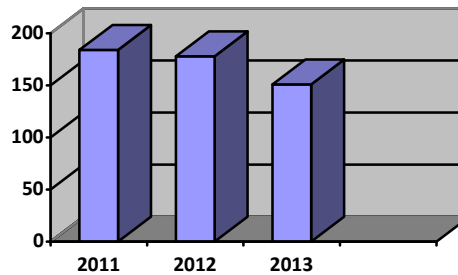
URAIAN	2012	2013	2014	RATA-RATA
Inflasi	4.61	9.94	10.85	8,46

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu tahun 2015

## 3. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka fluktuasi, dengan modus kejahatan yang bermacam-macam. Pada tahun 2013, angka kriminalitas yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh pihak berwajib mencapai angka 151 kasus, turun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 178 kasus.

**Gambar 2.2**  
**Angka Kriminalitas yang tertangani**



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

### B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator yang mendukung pembangunan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dapat dilihat dari capaian angka-angka diantaranya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, serta pengeluaran per kapita penduduk yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara ringkas indikator pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Angka Harapan Hidup ( <i>tahun</i> )	67,59	67,77	67,88	
2	Angka Melek Huruf (%)	96,51	96,51	96,54	96,90
3	Angka Kemiskinan	22,55	23	22,90	21,91
4	Angka Pengangguran	1,56	2,3	2,8	
5	Rata-Rata Lama Sekolah ( <i>tahun</i> )	8,24	8,36	8,71	8,75
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	92,27	96,83	98,20	98,40
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	70,28	72,65	76,37	80,20
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat	62,94	51,54	72,98	78,80
9	Pengeluaran per Kapita	636.566	639,61		
10	IPM	66,50	66,77	67,61	68,28

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para pelaksana pembangunan. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

## 1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

### a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan serta pemerataan dalam bidang pendidikan sehingga dapat mendorong penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak/besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sesuai dengan jenjangnya. APS terbagi kedalam golongan usia yaitu usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. APS di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend peningkatan. Hal ini menandakan bahwa persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin meningkat.

**Tabel 2.12**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2011 s/d 2014**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Kelompok Usia	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	7 – 12 tahun	99,49	99,37	99,90	
2	13 – 15 tahun	90,84	95,48	95,86	
3	16 – 18 tahun	74,90	73,09	76,20	

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

### b. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan menjadi kebutuhan dan mutlak dipenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan dalam bidang kesehatan adalah baiknya layanan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.13**  
**Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2011 s/d 2014**

No	Fasilitas Kesehatan	2011	2012	2013	2014
1	RSU	1	1	1	1
2	Puskesmas	14	14	14	14
3	Puskesmas Pembantu	41	41	41	41
4	Rumah Bersalin	2	2	2	2
5	Apotik	14	18	18	18
6	Toko Obat Berizin	3	3	3	3
7	Posyandu	190	191	191	191

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

Ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Bengkulu Selatan yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, harus mendapatkan



perhatian serius dari Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2011 s/d 2014**

No	Tenaga Medis	2011	2012	2013	2014
1	Dokter Umum	43	25	27	39
2	Dokter Gigi	6	5	3	4
3	Dokter Spesialis	5	4	1	6
4	Bidan	235	328	328	335

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

### c. Transportasi

Dalam rangka mendukung tercapainya konektivitas jaringan khususnya dalam hal ketersediaan sarana prasarana transportasi, perlu terus dikembangkan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterisolasian serta membuka akses hubungan dengan daerah lain, sehingga memberikan *value added* menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sarana transportasi darat yaitu ketersediaan jaringan jalan menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penggunaan moda angkutan jalan, sedangkan transportasi udara dan air belum tersedia. Namun sarana prasarana infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum memadai dan memerlukan penanganan segera dikarenakan kondisi jalan sudah banyak yang rusak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian baik itu dari Pemerintah untuk jalan-jalan nasional, Jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri.

Berikut data jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan pemeliharaannya:

**Tabel 2.15**  
**Status Jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)			
		2011	2012	2013	2014
1	Nasional	97,58	110,477	110,47	110,477
2	Provinsi	123,10	123,10	125,60	128,80
3	Kabupaten	656,29	689,53	728,23	773,510
	<b>Total</b>	<b>876,97</b>	<b>923,107</b>	<b>964,30</b>	<b>1,012,787</b>

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

## 2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### a. Pertanian

Bidang pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, mengingat di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup menjanjikan dan memiliki prospek yang baik apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik.



**Tabel 2.16**  
**Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang**  
**di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
1	Manna	4.169	-	4.169
2	Bunga Mas	4.479	4	4.483
3	Kota Manna	1.470	15	1.485
4	Pasar Manna	575	-	575
5	Kedurang	10.810	-	10.810
6	Kedurang Ilir	3.593	-	3.593
7	Seginim	14.500	-	14.500
8	Air Nipis	13.877	-	13.877
9	Pino	6.279	11	6.290
10	Ulu Manna	2.584	281	2.865
11	Pino Raya	6.573	1.080	7.653
	2013	69.909	1.391	70.300
	2012	68.908	1.391	70.299
	2011	64.332	1.217	65.549

*Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015*

**b. Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat. Sumbangan terhadap PDRB ditunjukkan dengan jumlah produksi perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	
		Perikanan Laut	Perikanan Darat
1	Manna	116,46	267,23
2	Bunga Mas	67,62	85,87
3	Kota Manna	53,45	260,59
4	Pasar Manna	1.248,50	153,38
5	Kedurang	-	288,84
6	Kedurang Ilir	121,56	176,76
7	Seginim	-	2.779,86
8	Air Nipis	-	1.598,73
9	Pino	-	476,09
10	Ulu Manna	-	321,94
11	Pino Raya	166,66	116,33

	2014	1.774,25	
	2013	1.222,25	6.520,12
	2012	1.088,42	5.384,21
	2011	1.189,82	4.128,01

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

### c. Perkebunan

Perkebunan juga menjadi salah satu sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe.

Lokasi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan, dimana pada masing-masing kecamatan memiliki perkebunan yang luasnya bervariasi.

**Tabel 2.18**  
**Luas Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kecamatan	Jenis Tanaman Perkebunan (Ha)						
	Kopi	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Cengkeh	Lada	Coklat
Manna	68	121,5	133	1.421	1	0	67
Bunga Mas	12	701	61	1.566	0	0	75
Kota Manna	7	113,5	46	705,3	1,95	0	91
Pasar Manna	4	12	25,5	134	1	0	9
Kedurang	772	469	101,55	546	16,5	0	208
Kedurang Ilir	107	1.083	38,05	1.565	3,7	0	60
Seginim	130	145	133	277	0,5	1,5	90
Air Nipis	613	137	98,5	439,5	0	0	128
Pino	75	487,5	50	1.189,07	6	5	244
Ulu Manna	656	925	84	924	0	13	211
Pino Raya	227	463,5	181	5.325,5	4	5,5	290
2014	2.671	4.654,5	951,6	14.092,37	34,65	25	
2013	2.716,5	4.608	951	13.729,87	27,7	28,2	1.473
2012	2.847	4.605	928,5	13.594,1	25,20	37,2	1.473
2011	2.965	4.585	1.024	13.806,3	46,55	253,5	1.578,5

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan tetap terbuka pada persaingan dan perubahan yang ada.

#### 1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah antara lain ; angka konsumsi RT per

kapita, persentase konsumsi RT untuk non pangan, produktivitas 9 sektor PDRB, pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa-jasa.

## 2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Kaur yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan berdasarkan permukaan pada tahun 2008 yaitu:

1. Jalan Aspal : 110,95 Km
2. Jalan Hotmix : 172,75 Km
3. Jalan Kerikil : 176,70
4. Jalan Tanah : 196,50

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (jalan sentra produksi dan irigasi) merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus produksi maupun pemasaran hasil.

## 3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator yang berkaitan erat dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu angka kriminalitas.

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.19**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Jenis Kriminalitas	Angka Kriminalitas		
		2011	2012	2013
1.	Jumlah kasus Narkoba	6	6	6
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	2
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	3	22	22
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	29	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	123	150	150
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-

8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	282	329	329
9.	Jumlah Penduduk	145.153	146.891	146.891
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	1.94	2.24	2.24

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2015

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan masih harus dilakukan evaluasi untuk bisa mengatakan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Secara singkat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Bidang Pendidikan

Pembangunan pada bidang pendidikan dapat dikatakan sudah cukup menunjukkan perkembangan yang baik meskipun perlu mendapatkan perbaikan dan peningkatan kualitas yang lebih baik lagi. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan bidang Pendidikan telah mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah. Kondisi ini menjadi pendorong meningkatnya capaian persentase penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis sebesar 96,54 persen, dengan rata-rata lama lama sekolah 8,67 tahun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP.

Beberapa indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2013 APS untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,90 persen, yang berarti bahwa 99,90 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah. Untuk penduduk usia 13-15 tahun sekitar 95,86 persen yang bersekolah dan kelompok penduduk usia 16-18 tahun hanya 76,20 persen yang bersekolah.

APK Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 untuk SD sederajat sebesar 108,99 persen artinya masih ada murid SD sederajat yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM menjelaskan banyaknya murid pada usia sekolah tertentu terhadap tingkat pendidikannya. APM tahun 2013 untuk tingkat SD sederajat sebesar 98,20 persen artinya sekitar 98 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah di tingkat SD sederajat, sedangkan 3 persen lagi belum/tidak bersekolah di SD sederajat atau sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

### 2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas sarana prasarana serta layanan kesehatan. Selain itu juga diupayakan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, juga melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit di masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan telah menunjukkan progress yang signifikan, dimana salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2012 hampir sama keadaannya pada tahun sebelumnya. Untuk apotik jumlahnya meningkat menjadi 18 unit dan posyandu meningkat menjadi 191 unit. Jumlah tenaga kesehatan secara total menurun dibanding tahun sebelumnya dari 887 orang menjadi 716 orang pada tahun 2012. Rinciannya

adalah 4 orang dokter spesialis, 45 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi, 141 orang bidan dan 521 orang tenaga kesehatan lainnya.

Penolong kelahiran (terakhir) di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2012 umumnya adalah bidan/ bidan desa yaitu sekitar 71,7 persen dari total seluruh kelahiran, selanjutnya dukun sebesar 18,9 persen, sedangkan penolong kelahiran oleh dokter hanya sebesar 8,5 persen.

Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai upaya mendukung pencapaian *millennium development goals* (MDGs), maka kedepannya perlu ditingkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar melakukan persalinan dengan penolong kelahiran tenaga kesehatan.

### **3. Bidang Pekerjaan Umum**

Pembangunan bidang pekerjaan umum belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak infrastruktur terutama jalan-jalan kabupaten yang notabene menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri masih banyak yang perlu diperbaiki. Disamping itu juga jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga sudah banyak mengalami kerusakan. Pembangunan infrastruktur dasar yang juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat yaitu jalan sentra produksi serta irigasi perlu mendapatkan perhatian agar dapat ditingkatkan pembangunan maupun pemeliharannya dengan memperhatikan standar dan kualitas yang baik.

Pada saat yang sama juga perlu dilakukan pembangunan jalan di desa-desa terpencil dan terisolir agar mobilitas masyarakat terutama arus hasil produksi dapat berjalan lancar, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Disamping itu infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah dengan daerah lain perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan untuk mendukung terjalannya interkoneksi, dalam rangka mendukung pencapaian program MP3EI.

### **4. Bidang Pertanian**

Bidang pertanian adalah sektor penyumbang terbesar PDRB serta menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Namun pembangunan di bidang pertanian masih belum memberikan solusi konkret terhadap rencana prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015. Banyaknya permasalahan yang muncul menjadi pertanda bahwa pembangunan bidang pertanian belum berjalan maksimal, diantaranya masih maraknya alih fungsi lahan, jaringan irigasi yang tidak memadai serta kurangnya ketersediaan pupuk bagi masyarakat.

Dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menuju Bengkulu Selatan Tangguh berbasis agroindustri, perlu dilakukan revitalisasi program prioritas sektor pertanian dengan kegiatan riil dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2015**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2014			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>											
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dimanfaatkannya jasa jasa Telp, air dan listrik	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Penyediaan jasa admistrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan alat tulis kantor	Termanfaatkannya alat tulis kantor	100	36	12	12	98	12	60	60	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dimanfaatkannya barang cetakan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Dimanfaatkannya komponen listrik	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dimanfaatkannya surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan	100	36	12	12	98	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	Terlaksananya rapat kordinasi antar instansi	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penetapan angka kredit	Tertib administrasi naik pangkat jabatan fungsional guru, pengawas, penilik & pamong	100	6	2	2	100	2	8	8	
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-									
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Termanfaatkannya peralatan gedung kantor	100	36	12	12	97	12	60	60	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	Dimanfaatkannya peralatan kantor dengan baik	100	24	8	8	100	8	40	40	



	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Dimanfaatkannya gedung kantor dengan baik	100	24	8	8	100	8	40	40	
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM dan pengetahuan peserta pendidikan dan pelatihan formal	100	138	46	46	99	46	230	230	
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD (LAKIP)	Tercapainya penyusunan LAKIP	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Laporan keuangan yang tepat waktu	100	6	2	2	100	2	10	10	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan keuangan prognosis tepat waktu	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggran/Dokumen Pelaksana Anggaran Tahunan	Tercapainya Rencana Kerja Anggaran	100	6	2	2	100	2	10	10	
	<b>Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>										
	Pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA)	Meningkatnya pengetahuan para Paskibra	100	120	40	40	100	40	200	200	
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Meningkatkan pembinaan sekolah tentang UKS	100	90	30	30	100	30	150	150	
	<b>Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>										
	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Terjaring atlit tingkat kabupaten	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pekan olahraga seni SD dan SMP Tingkat Kabupaten dan provinsi	Mendapatkan atlet berprestasi untuk dikirim ke tingkat provinsi	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat/Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Terjaringnya tim/kompetisi olahraga yang berkualitas	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Administrasi sekolah dapat berjalan dg baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pengembangan anak usia dini	Program PAUD dapat berjalan dengan lancar	100	360	120	120	100	120	600	600	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya kegiatan PKBM	100	33	11	11	100	11	55	55	
	<b>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>										
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Meningkatnya jenjang pendidikan setara SMP	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Termanfaatkannya perlengkapan sekolah	100	225	75	75	99	75	375	375	

Workshop Pengelolaan Inventaris Sekolah SD/MI	Meningkatkan kemampuan aparaturnya sekolah	100	700	140	140	100	140	980	980	
Sosialisasi Penyelenggaraan UN SD/MI dan SMP/MTs	Tersosialisasinya penyelenggaraan UN	100	700	140	140	100	140	980	980	
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dana BOS	Terlaksananya Program BOS dengan baik	100	516	172	172	100	172	860	860	
Olimpiade MIPA tingkat SD/MI	Meningkatnya mata pelajaran MIPA	100	108	36	36	100	36	180	180	
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI	Terlaksananya UAS dan UASBN SD/MI	100	3	1	1	99	1	5	5	
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/MTs	Terlaksananya UAS	100	120	40	40	100	40	200	200	
Pengadaan perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Administrasi sekolah dpt berjalan dengan baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
Olimpiade Sain Nasional Tingkat SMP/MTs	Terlaksananya OSN Tingkat SMP/MTs	100	525	175	175	100	175	875	875	
Biaya Operasional kegiatan Dana Alokasi Khusus	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	100	3	1	1	80	1	5	5	
Pemberian Beasiswa kepada siswa SD/MI/SMP/MTs	Meningkatnya motivasi belajar siswa	100	150	50	50	100	50	250	250	
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD dan SMP (Dana Isentif Daerah)	Terlaksananya rehab bangunan sekolah SD dan SMP	100	3	1	1	89	1	5	5	
Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Termanfaatkannya gedung sekolah SD dan SMP	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>Pendidikan Menengah</b>										
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sekolah memiliki raport dan buku induk siswa	100	57	19	19	99	19	95	95	
Pelatihan Penyusunan kurikulum	Siswa dapat belajar sesuai dengan kurikulum	100	60	20	20	100	20	100	100	
Penyelenggaraan paket C setara SMA	Meningkatkan kelulusan paket C setara SMA	100	900	300	300	100	300	1500	1500	
Pra olimpiade sains SLTA	Terlaksananya pembinaan & OSN di sekolah	100	48	16	16	97	16	80	80	
Olimpiade Olahraga SLTA	Pembinaan&OOSN di Tk. Sekolah	100	42	14	14	100	14	70	70	
Penyelenggaraan UN/US SMA/SMK/MA	Terlaksananya UN/US SMA,MA,SMK	100	7110	2370	2370	100	2370	11850	11850	
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa tingkat menengah	Terlaksananya lomba Bidang Studi&UUD '45	100	51	17	17	94	17	85	85	
Monitoring Penerimaan Siswa Baru dan Masa Orientasi Sekolah	Terlaksananya kegiatan MOS SMA/SMK	100	57	19	19	100	19	95	95	
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah madrasah	Terlaksananya akreditasi sekolah madrasah	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Patriolis Nasionalisme pemuda tidak luntur	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>										
Penerapan sistem dan informasi	Tercapainya sistem manajemen	100	3	1	1	100	1	5	5	



	manajemen pendidkan (profil pendidikan)	pelayanan pendidikan									
	Pengembangan ICT Jardiknas	Terlaksananya kegiatan jardiknas Zona kantor	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Pengawasan, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan	100	3	1	1	10	1	5	5	
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan melalui beasiswa prestasi <b>Peningkatan Mutu Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan</b>	Meningkatnya motivasi belajar siswa berprestasi	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terealisasinya sertifikasi/tunjangan profesi guru & pengawas di Kab. Bengkulu Selatan	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Menghasilkan guru, kepala&pengawas serta guru PLB yang berdedikasi berprestasi.	100	135	45	45	99	45	225	225	
	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Workshop guru mata pelajaran (MGMP) KTSP SMA/SMK <b>Pendidikan Non Formal</b>	Meningkatnya pengetahuan bagi guru	100	63	21	21	100	21	105	105	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya kegiatan PKBM	100	33	11	11	100	11	55	55	
<b>DINAS KESEHATAN</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Tersedia dana jasa komunikasi air dan listrik	100	36	12	12	93	12	60	60	
	Jasa administrasi keuangan	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan ATK	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan	Tersedia bahan bacaan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan makan minum	Terpenuhinya kebutuhan makan minum	100	36	12	12	37	12	60	60	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri	100	36	12	12	98	12	60	60	

Penetapan angka kredit	Terpenuhinya penetapan angka kredit	100	27	9	9	100	9	45	45	
<b>Program Peningkatan sarana Aparatur</b>										
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terawat dengan baik	100	36	12	12	100	12	60	60	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opr		100				98		0	0	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
<b>Program Peningkatan kapasitas Daya Aparatur</b>										
Pendidikan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	100	6	2	2	0	2	10	10	
<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</b>										
Penyusunan RKA/DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	100	3	1	1	100	1	5	5	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100	3	1	1	94	1	5	5	
<b>Program Upaya Kesehatan masyarakat</b>										
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Masyarakat miskin di luar jamkesmas dapat mengakses pelayanan kesehatan	100	15069	5023	5023	100	5023	25115	25115	
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan	Terlaksana pengawasan atau pemantauan obat dan makanan	100	3	1	1	100	1	5	5	
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dapat teratasinya masalah kesehatan	100	36	12	12	100	12	60	60	
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan	Masalah kesehatan dapat teratasi dengan baik	100	36	12	12	100	12	60	60	
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Tersedia honorarium dokter, dokter gigi dan petugas jaga puskesmas perawatan	100	36	12	12	99	12	60	60	
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	- Terlaksana penyemprotan di TTU	100						60	60	
	- Terlaksana pertemuan evaluasi program PKA-PL	100	36	12	12	100	12	0	0	
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas (JAMKESMAS)	Masyarakat miskin di puskesmas diharapkan mendapat pelayanan kesehatan maksimal	100	36	12	12	75	12	60	60	
<b>Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan</b>										
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan di masyarakat	100	36	12	12	100	12	60	60	
Penyuluhan Masyarakat Pola hidup	Meningkatnya pengetahuan	100	3	1	1	100	1	5	5	

sehat	masyarakat tentang kesehatan										
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	CTPS Petugas promkes dapat memberikan penyuluhan kesehatan yang maksimal	100	100%	100%	100%	100	100%	3	3		
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dlm Mendukung Pelayanan Kesehatan (PMI)		100				95		0	0		
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>											
Penanggulangan KEP, Anemi Gizi Besi, GAKY dan kekurangan zat gizi lainnya	Tidak ditemukan balita gizi buruk	100	45	15	15	100	15	75	75		
<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>											
Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat	Terselenggaranya manajemen kegiatan proyek pisik maupu nonpisik	100	15	5	5	86	5	25	25		
<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</b>											
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	Terlaksana program pencegahan penyakit menular	100	42	14	14	100	14	70	70		
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidem	Terobatinya penderita Filaria secara maksimal	100	42	14	14	100	14	70	70		
Peningkatan Imunisasi	- Tercapainya UCI Desa/Kelurahan	100				100					
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penyebaran penyakit dapat diatasi secara dini	100	42	14	14	87	14	70	70		
<b>Program Standarisasi Pelayanan kesehatan</b>											
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar standar pelayanan kesehatan	Tersedianya data dan informasi kesehatan yang akurat dan akuntabel	100	3	1	1	100	1	5	5		
Registrasi, Akreditasi dan Prasarana Bidang kesehatan	Terlaksananya identifikasi, registrasi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan	100	3	1	1	100	1	5	5		
Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	Terlaksana Pemetaan Tenaga Kesehatan di kab. b/s	100	3	1	1	100	1	5	5		
<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</b>											
Peningkatan Mutu Pelayanan Petugas Pengelola program kesehatan ibu dan anak	Menurunnya jumlah angka kematian ibu dan bayi didesa	100	36	12	12	100	12	60	60		
<b>Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah Raga</b>											

	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terciptanya instruktur senam yg profesional di kab.B/S	100	3	1	1	98	1	5	5	
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH</b>											
1	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik	100	3	1	1	91	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	100	3	1	1	98	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor berjalan dengan baik	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor	Tersedinya ATK	100				99		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan,photo copy & penjiilidan	100				100		0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik & barang elektronik di rumah sakit	100				99		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	100				92		0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan dan fasilitas untukn menunjang kegiatan dapur di RSUD HD Manna	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya jasa makanan & minuman	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keLuar Daerah	Tersedinya dana rapat-rapat , koordinasi & konsultasi keluar daerah	100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penetapan Angka Kredit	Penetapan angka kredit jabatan fungsional	100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan Jasa Perawatan & Pengobatan	Tersedinya jasa perawatan & pengobatan	100	300	100	100	100	100	500	500	
2	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedinya perlengkapan gedung kantor	100	300	100	100	99	100	500	500	
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedinya anggaran pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	100	300	100	100	100	100	500	500	
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedinya anggaran pemeliharaan rutin gedung kantor	100	3	1	1	98	1	5	5	
3	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	100	300	100	100	85	100	500	500	
	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>										

4	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan terlaksana dengan baik	100	300	100	100	100	100	500	500	
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>										
5	Pendidikan dan pelatihan formal	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terlaksana dengan baik	100	300	100	100	95	100	500	500	
	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA AKHIR TAHUN</b>										
6	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan terlaksana dengan baik	100	300	100	100	97	100	500	500	
	Penyusunan rencana kerja anggaran(RKA/DPA) SKPD	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan terlaksana dengan baik	100	300	100	100	99	100	500	500	
7	<b>OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>										
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan terlaksana dengan baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
7	<b>PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA &amp; PRASARANA RS</b>		100				97		0	0	
	Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan RS berjalan dengan baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
7	Pengembangan ruang gawat darurat Rumah Sakit	Pegembangan UGD RS berjalan dengan baik	100	3	1	1	96	1	5	5	
	Pengadaan alat-alat kesehatan RS	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RS terlaksana dengan baik	100	3	1	1	99	1	5	5	
7	Pengembangan type RS	Pembangunan RS berjalan dengan baik	100	3	1	1	74	1	5	5	
	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Kegiatan monev berjalan dengan baik	100	300	100	100	100	100	500	500	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>											
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber daya air,, listrik	100	36	12	12	52	12	60	60	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	100	36	12	12	56	12	60	60	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kenyamanan lingkungan kantor	100	36	12	12	95	12	60	60	
	Penyediaan alat tulis kantor	Optimalisasi perangkat kantor	100	36	12	12	84	12	60	60	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan	100	36	12	12	84	12	60	60	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Termanfaatkannya/terangnya kantor	100	36	12	12	96	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Meningkatnya pengetahuan pegawai	100	36	12	12	73	12	60	60	

	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman	100	36	12	12	85	12	60	60
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya kinerja SKPD	100	36	12	12	59	12	60	60
	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100	36	12	12	7	12	60	60
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional lebih baik	100	36	12	12	95	12	60	60
	Pemeliharaan peralatan kantor	Terwujudnya peralatan kantor yang lebih baik	100	36	12	12	87	12	60	60
	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM aparatur	100	36	12	12	97	12	60	60
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	Pengumpulan Up Dating Data Analisa Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersusunnya/termanfaatkannya perencanaan design DED	100	45	15	15	14	15	75	75
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya /termanfaatkannya laporan	100	30	10	10	55	10	50	50
	Penyusunan Rencana Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya/tersedianya RKA/DPA-SKPD	100	12	4	4	65	4	20	20
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD/LPPD SKPD	Terlaksananya/termanfaatkannya LAKIP	100	30	10	10	100	10	50	50
	<b>Pembangunan/peningkatan jalan</b>									
	Pembangunan/peningkatan jalan hotmix/koral (Kegiatan DAU) (9 lokasi)	Terbangunnya transportasi jalan di wilayah Kab. Bengkulu Selatan	100	33	11	11	20	11	55	55
	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>									
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (Kegiatan DAU) (20 Lokasi Jalan dan 9 Lokasi Jembatan)	Terpeliharanya sarana dan transportasi jalan dan jembatan di wilayah Kab. Bengkulu Selatan	100	181,5	60,5	60,5	40	60,5	302,5	302,5
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>									
	Pembangunan gedung kantor (DAU)	Pembangunan Pagar	100	12	4	4	1	4	20	20
	<b>Penyusunan rancangan RPIJM (DAU)</b>	<b>Tersusunnya RPIJM</b>								
	Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	100	3	1	1	16	1	5	5
	<b>Pembangunan sarana dan</b>	<b>Tersedianya/terbangunnya</b>								

<p><b>prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata</b></p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit (DAU)</p> <p><b>Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan dan perkotaan</b></p> <p>Pembangunan/peningkatan infrastruktur</p> <p><b>Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b></p> <p>Pembangunan jaringan air bersih/air minum</p> <p><b>Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b></p> <p>Perencanaan pembangunan sistim pemadam kebakaran</p> <p><b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b></p> <p>Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAU)</p> <p>Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah</p> <p><b>Kerjasama Pembangunan</b></p> <p>Koordinasi dan pemecahan masalah-masalah daerah (program penanggulangan kemiskinan di perkotaan) (DAU)</p> <p><b>Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas L=1000 M2</p> <p><b>Pengembangan Kerja Pengelolaan Persampahan</b></p> <p>Perencanaan Pembangunan TPA (DAU)</p> <p><b>BIDANG PENGAIRAN</b></p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan</b></p>	<p><b>sarana rumah sakit</b></p> <p>Perencanaan teknis dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit</p> <p><b>Terbangunnya /tersedianya jalan lingkungannya dan drainase</b></p> <p>Pembangunan jalan lingkungan - drainase, plat duicker dan lapangan bola kaki</p>	100	9	3	3	1	3	15	15
	<p>Sarana dan prasaran air bersih</p>	100	45	15	15	1	15	75	75
	<p>Perencanaan teknis pembangunan sistem pemadam kebakaran</p>	100	3	1	1	4	1	5	5
	<p>Peningkatan jumlah pelanggan dan tingkat pelayanan PDAM</p>	100	75	25	25	0	25	225	225
	<p>Perencanaan teknisPembangunan IPAL dan IPL</p>	100	6	2	2	1	2	10	10
	<p>Terlaksananya Program Kerja sama Pembangunan Antar Daerah</p>	100	300	100	100	15	100	500	500
	<p>Terehabnya Mess Pemerintah</p>	100	3	1	1	1	1	5	5
	<p>Perencanaan teknis pembangunan TPA Sanitary Landfill</p>	100	3	1	1	0	1	5	5



	<b>Pengairan Lainnya</b> Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi telah dibangun	Berfungsinya jaringan irigasi	100	138	46	46	41	46	230	230	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi (DAU-PAD Paket I)	berfungsinya jaringan irigasi	100	3	1	1	1	1	5	5	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	berfungsinya jaringan irigasi	100	138	46	46	30	46	230	230	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> Pengawasan dan pembinaan pemanfaatan air irigasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi	100	138	46	46	51	46	230	230	
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Pembayaran Listrik dan Telepon Bulanan	100	3	1	1	<b>63</b>	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	3	1	1	<b>100</b>	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Perlatan Kebersihan Kantor	100	3	1	1	<b>98</b>	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	3	1	1	<b>100</b>	1	5	5	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetak dan Penggandaan	100	3	1	1	<b>100</b>	1	5	5	
	Penerangan Bangunan Kantor/Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100	3	1	1	<b>99</b>	1	5	5	
	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	1	1	<b>100</b>	1	5	5	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran, Majalah bulanan dan Buku-buku Peraturan Perundang-undangan	100	300	100	100	<b>100</b>	100	500	500	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100	3	1	1	<b>100</b>	1	5	5	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Satu Unit gedung Pola Bappeda	100	828	276	276	100	276	1380	1380	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda Dua	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung	100	3	1	1	63	1	5	5	



3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan rutin Berkala peralatan gedung kantor	TerPeleliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Terlaksana Perencanaan dengan baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
5	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Buku Lakip Bappeda	100	3	1	1	100	1	5	5	
	penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran	Terkumpulnya data untuk Penyusunan laporan prognosis realisasi Anggaran	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Terkumpulnya data untuk Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	3	1	1	100	1	5	5	
6	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terkumpulnya data untuk Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>										
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan	Tersedianya informasi BSDA & PDRB	100	180	60	60	100	60	300	300	
7	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data dan Inforamsi perencanaan yang akurat dan up to date	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>										
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Kesepakatan Forum Perencanaan percepatan Pembangunan Bengkulu	100	12	4	4	100	4	20	20	
8	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>										
	Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pelatihan Data Spesial	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manual pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi perda RTRW	100	3	1	1	91	1	5	5	
8	Koordinasi pemanfaatan Ruang Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi tat Ruang	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>										

9	Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya Koodinasi wilyah strategis Cepat Tunbuh	100	3	1	1	97	1	5	5	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar</b>		100						0	0	
	Koordinasi perencanaan Penanganan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi penanganan perumahan	100	3	1	1	1	1	5	5	
10	Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Terwujudnya peencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Pendataan Perencanaan Pembangunan Jalan Dua Jalur	Pendataan Perencanaan Jalan Dua Jalur Dalam Kota Manna	100	3	1	1	57	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
11	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renja SKPD Sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010	100	45	15	15	1	15	75	75	
11	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
	Penyusunan Rancangan RKPD	Tercapainya persentase penyusunan dokumen Rancangan RKPD 2013	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	100	3	1	1	100	1	5	5	
12	Penetapan RKPD	Dokumen RKPD 2013	100	150	50	50	100	50	250	250	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah	Rencana Pembangunan daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyusunan KUA,PPA APBD dan APBDP 2012	Terlaksananya mekanisme Penyusunan RAPBD 2013	100	36	12	12	100	12	60	60	
12	Penyusunan Masterplan Air Minum	Terlaksananya Penyusunan Master Air Minum	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Peny. Data Base Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Tersedianya Dokumen Buku Puyih dan Strategi Sanitasi Kota	100	3	1	1	95	1	5	5	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>										
13	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Program Perencanaan Ekonomi	100	300	100	100	100	100	500	500	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Peangulangan Kemiskinan	100	300	100	100	98	100	500	500	
	Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Selatan	Buku Minapolitan di Kabupaten Bengkulu Selatan	100	45	15	15	100	15	75	75	
13	<b>Program Perencanaan Sosial dan Buday</b>										

	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Sosbud	100	300%	100%	100%	98	100%	5	5	
	Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL)	Terlaksananya Kegiatan kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	100	300%	100%	100%	100	100%	5	5	
<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>											
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		100				81		0	0	
	penyediaan jasa administrasi keuangan		100				79		0	0	
	penyediaan jasa kebersihan kantor		100				67		0	0	
	Penyediaan alat tulis kantor		100				67		0	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100				74		0	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan		100				66		0	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100				63		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		100				54		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		100				85		0	0	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100				69		0	0	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		100				72		0	0	
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		100				71		0	0	
	Rehabilitasi ringan / berat gedung kantor		100				88		0	0	
	<b>Penataan kapasitas sumberdaya aparatur</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100				0		0	0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100				0		0	0	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		100				94		0	0	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		100				55		0	0	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		100				0		0	0	
	Penyusunan RKA/ DPA		100				96		0	0	
	<b>Program pengembangan nilai</b>										

	<b>budaya</b>										
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100				0		0	0		
	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi</b>										
	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	100				100		0	0		
	<b>Program Pengembangan pemasaran pariwisata</b>										
	peningkatan/ pemeliharaan obyek wisata	100				56		0	0		
	<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b>										
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan	100				41		0	0		
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>										
	peningkatan pembangunan saran dan prasarana pariwisata	100				3		0	0		
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	100				96		0	0		
	<b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b>										
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100				100		0	0		
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>										
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum	100				40		0	0		
	<b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b>										
	Fasilitasi penyelenggaraan Festifal budaya daerah	100				100		0	0		
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>										
	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan	100				84		0	0		
	<b>Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan keuangan</b>										
	Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan	100				52		0	0		
	<b>Program Kerjasama informasi dan media massa</b>										
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah	100				56		0	0		
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	100				99		0	0		
	<b>Program Peningkatan dan</b>										

	<b>pengamanan lalu lintas</b>										
	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas		100				0		0	0	
<b>UPT TERMINAL</b>											
	<b>Pel. Adminitrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan		100				68		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100				57		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100				52		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100				47		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100				25		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>		100				100		0	0	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100				100		0	0	
<b>UPT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR</b>											
	<b>Pel. Adminitrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan		100				93		0	0	
	Penyedia jasa Kebersihan Kantor		100				56		0	0	
	Penyediaan alat tulis kantor		100				66		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100				76		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		100				29		0	0	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin/berkala dinas/operasional		100				61		0	0	
	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>		100				0		0	0	
	Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor		100				0		0	0	
<b>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Terseadainya Kom,SDA dan Listrik	100	3	1	1	98	1	5	5	
	penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya Adm. Keuangan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Adm Kebersihan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Terseadainya Barang Cetak dan	100	3	1	1	100	1	5	5	

	Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Pengandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman diluar jam dinas	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya dana Rapat dan Konsultasi keluar daerah	100	3	1	1	84	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100	3	1	1	86	1	5	5	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100	3	1	1		1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terawatnya kendaraan dinas	100	3	1	1	57	1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terawatnya sarana kerja secara Baik dan optimal	100	3	1	1	51	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
	Penyusunan RKA/ DPA SKPD	Terbentuknya RKA dan DPA SKPD yang benar	100	3	1	1	79	1	5	5	
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>										
	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Meningkatnya teknologi pengolahan persampahan	100				90		0	0	
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>										
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Optimalnya analisis dampak lingkungan	100				89		0	0	
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RHT )</b>										
	Pengawasan dan Pengendalian RTH	Terkelolanya ruang terbuka hijau	100				75		0	0	
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, S D Air,Telphon & Listrik	Bukti jumlah pembayaran telpon dan listrik	100	36	12	12	62	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bukti pembayaran	100	36	12	12	115	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100	9	3	3	73	3	15	15	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terwujudnya perangkat peralatan kerja yang sempurna	100	3	1	1	0	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk administrasi perkantoran	100	3	1	1	100	1	5	5	

	Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya barang barang cetakan dan penggadaan	100	3	1	1	97	1	5	5	
	Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan B. Kantor	Tersedianya lampu lampu listrik dan peralatan	100	120	40	40	45	40	200	200	
	Penyediaan B.Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tukti jumlah pembayaran surat khabar	100	36	12	12	58	12	60	60	
	Kegiatan Makanan dan Minuman	Tersedianya Nasi Kotak	100	3	1	1	73	1	5	5	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bukti jumlah pembayaran perjalanan dinas	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>										
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	100	36	12	12	29	12	60	60	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bukti jumlah pembayaran pemeliharaan	100	36	12	12	75	12	60	60	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Seperangkat Bahan Peralatan Gedung	100	36	12	12	80	12	60	60	
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>										
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bid. Kependudukan	Terlayannya KTP, KK dan Administrasi Kependudukan	100	36	12	12	40	12	60	60	
	Pengembangan Data Base Kependudukan	Data Base Kependudukan yang Mutakhir dan Akurat	100	3	1	1	68	1	5	5	
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bid. Pencatatan Sipil	Tersedianya blanko-blanku akta capil untuk pelayanan	100	3	1	1	89	1	5	5	
	Pembinaan Masyarakat Desa Mandiri	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	100	3	1	1	54	1	5	5	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan per tahun	100	3	1	1	95	1	5	5	
	<b>Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja &amp; Keuangan</b>										
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKAP dan DPAP	100	3	1	1	88	1	5	5	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi	Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Listrik dan Air	100	36	12	12	65	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adm Keuangan	100	36	12	12	84	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Bahan Cetak dan Penggadaan	100	36	12	12	100	12	60	60	



Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan sarana Kerja	100	3	1	1	100	1	5	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan Bacaan	100	3	1	1	54	1	5	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Perjalanan Dinas	100	36	12	12	78	12	60	60
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbitnya SK Angka Kredit PKB	100	6	2	2	100	2	10	10
penetapan angka kredit									
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	1	1	1	100	1	3	3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan terawat dengan baik	100	36	12	12	97	12	60	60
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terawatnya Peralatan Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung BPPKB	100	3	1	1	99	1	5	5
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
Penyusunan LAKIP dan RENSTRA	Laporan Lakip dan Renstra	100	3	1	1	100	1	5	5
Penyusunan RKA	Terlaksananya RKA dan DPA	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Kegiatan Pembangunan</b>									
Pelayanan KIE	Terlaksananya Pemutaran Film	100	3	1	1	100	1	5	5
Pelayanan KB	Meningkatnya KB Aktif	100	3	1	1	96	1	5	5
Pengadaan Sarana & Prasarana Pelayanan KB	terlaksananya kegiatan sesuai juknis	100	3	1	1	96	1	5	5
<b>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender ( PUG )</b>									
Evaluasi Pelaksanaan PUG	Terbinanya Organisasi Kelompok Perempuan	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>									
Monitoring Evaluasi Pelaporan ( Temu Koordinasi Tim Penangan Terpadu Tindak KDRT, KTP, KTA	Tterselesaikan Kasus KDRT, KTP, KTA	100	3	1	1	99	1	5	5
Peningkatan Peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Tterselesaikan Kasus KDRT, KTP, KTA	100	3	1	1	99	1	5	5
<b>Program Peningkatan Peran Serta Keselarasan Gender dalam Pembangunan</b>									
Pembinaan Keluarga Sejahtera	Tterselesaikan Kasus KDRT, KTP, KTA	100	3	1	1	93	1	5	5

	Pembinaan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkulu Selatan <b>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>	Terselesaikan Kasus KDRT, KTP, KTA	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pengumpulan bahan Informasi ttg Pengasuhan dan Pemb Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya data KK, Pra KS, KS1, KS2, KS3 Plus	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>DINAS SOSNAKERTRANS</b>											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100				34		0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		100				28		0	0	
	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100				11		0	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100				34		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100				41		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100				38		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100				33		0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100				51		0	0	
	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		100				0		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100				33		0	0	
	Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100				62		0	0	
	penetapan angka kredit		100				59		0	0	
	pemeliharaan rutin berkala/berkala gedung kantor		100				0		0	0	
	pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan Dinas/operasional		100				30		0	0	
	pemeliharaan rutin berkala/berkala peralatan gedung kantor		100				35		0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan formal		100				0		0	0	
	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun		100				71		0	0	
	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100				70		0	0	
	penyusunan database tenaga kerja daerah		100				84		0	0	
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja		100				100		0	0	
	monitoring evaluasi dan pelaporan		100				71		0	0	

	LLS dan Pemerintah KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN (Capacity Building ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya		100				69		0	0	
	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		100				38		0	0	
	pemeliharaan sarana dan prsarana pemakaman		100				80		0	0	
	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap K3		100				67		0	0	
	monitoring evaluasi dan pelaporan Sosialisasi berbagai Peraturan		100				79		0	0	
	Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		100				93		0	0	
	Penyediaan dan pengelolaan prsarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan trasnmigrasi (Pembinaan)		100				36		0	0	
<b>UPTD LBK, DINAS SOSNAKERTRANS</b>											
	peningkatan sarana dan prsarana aparatur		100	36	12	12	74	12	60	60	
	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar		100	36	12	12	100	12	60	60	
<b>UPTD LLK, DINAS SOSNAKERTRANS</b>											
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik		100	36	12	12	93	12	60	60	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100	36	12	12	63	12	60	60	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100	36	12	12	73	12	60	60	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100	36	12	12	66	12	60	60	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100	36	12	12	72	12	60	60	
	Penyediaan B.Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		100	2,160	720	720	58	720	3600	3600	
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah		100				0		0	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		100				6		0	0	

	pengadaan peralatan gedung kantor		100				0		0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100				50		-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100				60		-	-	
	penyusunan RKA/DPA		100	3	1	1	100	1	5	5	
	Kegiatan Pelatihan UPTD LLK		100				0		-	-	
<b>PSTW, UPTD NAKERTRANSOS</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		100				80		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100				85		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100				71		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		100				100		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan		100				78		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		100				88		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100				86		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100				69		0	0	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		100				51		0	0	
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah		100				87		0	0	
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		100				63		0	0	
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100				32		0	0	
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan panti asuhan / panti jompo		100				48		0	0	
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Telepon dan Air	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor PNS	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya cetak penggandaan	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi dan dekomen	100	3	1	1	50	1	5	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar dan majalah	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi di dalam dan luar daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meubeleur kantor	100	48	16	16	99	16	80	80
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100	6	2	2	100	2	10	10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan	100	6	2	2	100	2	10	10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	100	15	5	5	78	5	25	25
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
Penyusunan Laporan Capaian Evaluasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan pelaporan	100	18	6	6	100	6	30	30
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan dan pelaporan	100	12	4	4	100	4	20	20
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial</b>									
Pelaporan Rehabilitasi Pasca Bencana	Data kondisi pasca bencana	100	-	-	-	100	-		
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>									
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Desa lokasi potensi bencana	100	3	1	1	100	1	5	5
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Tersedianya peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	100	12	4	4	100	4	20	20
Pemantauan RANET Gempa Bumi	Informasi Bencana Alam	100	9	3	3	99	3	15	15

	dan Tsunami <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b> Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Penanggulangan bahaya kebakaran	100	3	1	1	93	1	5	5	
<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Penyediaan bahan bacaan dan peundang-undangan Penyediaan makanan dan minum Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	Terciptanya penerangan dan komunikasi kantor Terwujudnya hasil kerja yang baik Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya segala kebutuhan perkantoran Terpenuhinya segala kebutuhan perkantoran Terciptanya sarana informasi media cetak Tersedianya makanan dan minuman adanya sinkronisasi kegiatan dan program	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	71 100 100 100 100 100 99 100 100 100	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya kelancaran operasional kantor Terciptanya kelancaran operasional kantor	100 100	36 36	12 12	12 12	97 100	12 12	60 60	60 60	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Pengadaan peralatan gedung kantor	Terciptanya Aparatur yang berkualitas	100	36	12	12	99	12	60	60	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya kelancaran operasional kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> Penyusunan RKA/DPA Penyusunan Lakip	Tersusunnya RKA, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100 100	36 21	12 7	12 7	100 100	12 7	60 35	60 35	

6	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b> Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terbitnya layanan pengguna UTTP	100	75	25	25	98	25	125	125		
		Terjaminnya Perlindungan Konsumen	100	3	1	1	99	1	5	5		
7	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b> Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya pembinaan dan Pelatihan bagi Pengerajin dan Pelaku IKM	Meningkatnya keterampilan IKM	100	6	2	2	100	2	10	10		
		Meningkatkan Keterampilan IKM	100	3	1	1	97	1	5	5		
8	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro menengah</b> Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	UMKM dan Koperasi tumbuh dan Berkembang	100	300	100	100	100	100	500	500		
9	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b> Pembinaan pembangunan sistem informasi perencanaan penegmbangan koperasi Penyebaran Model-model Pole Pengembangan Koperasi	Terciptanya iklim usaha yg kondusif bagi UMKM	100	50	50	50	100	50	150	150		
		Tersedianya sumber daya pengelola koperasi	100				100		0	0		
10	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b> Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha	tersediannya Kios dan los	100	3	1	1	100	1	5	5	1	
11	<b>Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri</b> Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha	Terciptanya pengontrak yg nyaman dan penerimaan PAD yang optimal	100	42	14	14	99	14	70	70		
		Terpenuhinya keb. masy. Eko. Menegah kbwh bangunan	100	3	1	1	100	1	5	5		
11	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b> Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Promosi Hasil Industri (Pameran/Bazar)	Terinformasinya harga 9 bahan pokok dan bahan bangunan	100	36	12	12	99	12	60	60		
11	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b> Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Promosi Hasil Industri (Pameran/Bazar)	Peningkatan volume pasar dan produk IKM	100	12	4	4	100	4	20	20		
		Peningkatan volume pasar dan produk IKM	100	3	1	1	90	1	5	5		
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  Penyediaan Jasa Listrik  Penvediaan jasa Administrasi											
		untuk penerangan dan kelancaran kerja/ Tersedianya jasa listrik	100					100		0	0	
		Tersedianya jasa adm. keuangan	100					100		0	0	



	Keuangan										
	Penyediaan Jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100				100		0	0	
	Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100				100		0	0	
	Belanja Brg Cetak dan Penggandaan	Tersedianya brg. cetakan penggandaan	100				100		0	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perleng.Kantor	Tersedianya perl. Dan perlengkapan kntr.	100				100		0	0	
	penyediaan Bahan Bacaan	Tersediannya bahan bacaan	100				100		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100				100		0	0	
	Rapat 2 koordinasi & konsult ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100				100		0	0	
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100				100		0	0	
	Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opsr	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas /Operasional	100				100		0	0	
	Pem. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100				100		0	0	
	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
	Penyusunan Lap. Kinerja dan lktisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	100				100		0	0	
	Penyusunan Laporan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100				100		0	0	
	Penyusunan Lap. Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan Prognosis ralisasi anggaran	100				100		0	0	
	Penyusunan Laporan Keu. Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100				100		0	0	
	Penyusunan RKA/DPA	Tersusunnya RKA/DPA	100				100		0	0	
	penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja	100				100		0	0	
	<b>Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>										
	Komunitas Intelijen Daerah	Terlaksananya Komunitas Intelijen daerah	100				100		0	0	
	Pengawasan aliran Kepercayaan masyarakat (Pakem)	Terlaksananya kerukunan dalam kehidupan beragama	100				100		0	0	
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>										
	Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Terlaksananya bantuan keuangan kepada Partai Politik	100				100		0	0	
	Rapat Koordinasi Penanganan ORMAS	Terlaksananya rapat-rapat Ormas	100				100		0	0	
	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										

	Peningkatan Kesadaran Masy. Akan Nilai - nilai luhur Budaya Bangsa	Meningkatnya kesadaran masy. Pd nilai-nilai luhur budaya bangsa	100				100		0	0	
	Sosialisasi wawasan Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	100				100		0	0	
<b>KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		100				16		0	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100				26		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100				16		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100				25		0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100				28		0	0	
	Penerangan Bangunan Kantor/Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		100				30		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100				19		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		100				0		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100				25		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung		100				0		0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100				30		0	0	
	Pemeliharaan rutin Berkala peralatan gedung kantor		100				15		0	0	
	Bel. Modal Pengadaan Komputer		100				0		0	0	
	Note Book		100				0		0	0	
	Bel. Modal Pengadaan Kamera		100				0		0	0	
	Bel. Pengadaan Pakaian Dinas		100				0		0	0	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur		100				2		0	0	
	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>										
	Pengendalian Keamanan Lingkungan		100				15		0	0	
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100				19		0	0	
	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>										
	Peningkatan Pengawasan Peredaran		100				14		0	0	

	Barang dan Jasa <b>Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b> Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan		100				23		0	0	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>											
<b>BAGIAN HUMAS</b>											
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100				5		0	0	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100				62		0	0	
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		100				20		0	0	
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		100				53		0	0	
	Pembinaan Komunikasi dan Pengembangan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi		100				0		0	0	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		100				33		0	0	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		100						0	0	
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		100				67		0	0	
<b>BAGIAN KEUANGAN</b>											
	Honorarium Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah		100				24		0	0	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		100				3		0	0	
	Peyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100				20		0	0	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		100				0		0	0	
	Penyusunan RKA / DPA		100				55		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100				0		0	0	
	Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan		100				0		0	0	
	Setda/KDH/WKDH										
	Pedoman Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan		100				16		0	0	
	Setda/KDH/WKDH										
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		100				0		0	0	
	Penyediaan jasa administrasi		100				42		0	0	

	Keuangan										
	Penyediaan jasa Telekomunikasi dan Sumber daya Listrik		100				70		0	0	
	Penyediaan Makan Minum		100				13		0	0	
	Bimbingan Teknis Impelementasi		100				27		0	0	
	Perundang-undangan										
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		100				0		0	0	
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>											
	Pembinaan Pemuda Pelopor		100				1		0	0	
	Keamanan Lingkungan										
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		100				0		0	0	
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah		100				100		0	0	
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha		100				99		0	0	
	Pentas Seni Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		100				24		0	0	
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama		100				100		0	0	
	Peningkatan Kualitas SDM										
	Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100				2		0	0	
	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya										
	Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		100				78		0	0	
<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>											
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		100				23		0	0	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		100				0		0	0	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100				0		0	0	
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		100				0		0	0	
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100				0		0	0	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)		100				0		0	0	
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah		100				0		0	0	
<b>BAGIAN HUKUM</b>											
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		100				0		0	0	

	Fasilitasi sekretariat rencana aksi nasional HAM		100				48		0	0	
	Penanganan kasus permasalahan hukum di lingkungan pemda		100				20		0	0	
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		100				54		0	0	
	Publikasi peraturan perundang-undangan		100				16		0	0	
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>											
	Pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha )		100				59		0	0	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		100				14		0	0	
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan		100				26		0	0	
	penyusunan dokumen perencanaan										
	Monitoring dan evaluasi		100				11		0	0	
	Pengendalian Pembangunan										
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan		100				23		0	0	
	Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah										
	Evaluasi Dana Swadaya Masyarakat		100				2		0	0	
<b>BAGIAN EKONOMI</b>											
	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)		100				22		0	0	
	Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Raskin		100				9		0	0	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan		100				0		0	0	
	pelaksanaan penanaman modal										
	Penyelenggaraan pameran investasi		100				40		0	0	
<b>BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>											
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		100				86		0	0	
	Penyediaan Instrumen Sistem		100				0		0	0	
	Pengendalian Intern Pemerintah										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100				92		0	0	
	Pembentukan dan Penataan Kelembagaan Daerah		100				25		0	0	
	Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )		100				1		0	0	
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		100				65		0	0	
<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>										

<b>Perkantoran</b>	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	100				98		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100				0		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Komponen Listrik	100				100		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	100				100		0	0	
	Penyediaan Makan dan Minum	100				100		0	0	
	rapat -rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>									
	Pemeliharaan rutin /berkala	100				100		0	0	
	Kendaraan Dinas/Operasional									
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanGedung Kantor	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
	Sosialisasi Organisasi Korpri	100				100		0	0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	100				100		0	0	
	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>									
	Penataan sistem adm. Dan informasi	100				100		0	0	
	Anggota KORPRI									
	Peningkatan kesadaran abdi negara, Pemerintah & Masyarakat	100				100		0	0	
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	3	1	1	100	1	5	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	36	12	12	100	12	60	60
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5
	Penyediaan Jasa Jaminan	Tersedianya Jasa Jaminan	100	3	1	1	100	1	5	5
	Pemeliharaan Kesehatan	Pemeliharaan Kesehatan								
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	36	12	12	100	12	60	60
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	36	12	12	100	12	60	60
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	36	12	12	100	12	60	60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD	100	36	12	12	100	12	60	60
Blanja premi asuransi kendaraan dan gedung	tersedianya asuransi kendaraan dan gedung	100						0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100	36	12	12	100	12	60	60
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tercapainya program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	3	1	1	57	1	5	5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	100	3	1	1	50	1	5	5
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100	-	-	-		-		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	3	1	1	0	1	5	5
Penyusunan RKA-DPA SKPD	Disusunnya RKA-DPA /RKAP-DPPA SKPD	100	3	1	1	50	1	5	5
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	100	3	1	1	60	1	5	5
<b>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional	100	6	2	2	100	2	10	10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	100	3	1	1	100	1	5	5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	100	3	1	1	100	1	5	5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional	100	3	1	1	100	1	5	5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	100	36	12	12	100	12	60	60
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Tersedianya Rehabilitasi Rumah Jabatan	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tercapainya program peningkatan Disiplin Aparatur</b>								
Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Anggt. DPRD	100	3	1	1	100	1	5	5
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tercapainya pelaporan kinerja keuangan</b>								
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	terlaksannnyacapaian kinerja SKPD	100				100		0	0
penyusunan Laporan keuangan semesteran	Terlaksananya Laporan keuangan semesteran	100				100		0	0
Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun	Terlaksananya Laporan keuangan akhir Tahun	100				100		0	0
Penyusunan RKA-DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA SKPD	100				100		0	0
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100				100		0	0
<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	<b>Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>								
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
Hearing/Dialog dan Koordinasi dg Pejabat Pemerintah Daerah	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dg Pejabat Pemerintah Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	100	3	1	1	100	1	5	5
Rapat - rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna	100	3	1	1	100	1	5	5
Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	100	3	1	1	100	1	5	5
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	3	1	1	100	1	5	5
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksannnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100				100		0	0
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber</b>								

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	<b>daya aparatur</b> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Anggt. DPRD dan Pegawai Sekretariat	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>INSPEKTORAT</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & Listrik	Optimalisasi Penerangan Kantor	100				81		0	0	
	Penyediaan Jasa adm Keuangan	Terlaksananya Adm Keuangan dengan Baik	100				100		0	0	
	Penyediaan ATK	Tercapainya Prosentase Kebutuhan ATK 1 Th	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kelancaran administrasi Perkantoran	100				100		0	0	
	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Bangunan Penerangan Kantor	Berfungsinya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Peralatan Runah Tangga	Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga	100				100		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Meningkatkan Pengetahuan Pegawai	100				100		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi&Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan	100				100		0	0	
	Penetapan Angka Kredit	Meningkatkan Kinerja SKPD	100				100		0	0	
		Terpenuhi Penetapan Angka Kredit	100				88		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Prosentase Pemeliharaan Kendaraan	100				100		0	0	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	100				98		0	0	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Tercapainya Prosentase Pemeliharaan Komputer	100				100		0	0	
	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Kinerja	100				100		0	0	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana	Tersusunnya RKA/DPA SKPD	100				100		0	0	

	Anggaran (RKA/DPA) SKPD <b>Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan &amp; Aparatur Pengawasan</b> Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Tentang Pelaporan AKIP	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan aparatur Meningkatnya Jumlah Kasus yang terselesaikan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan aparatur Terlaksananya Inpres No.5 Th 2004 Secara Efektif	100 100 100 100				100 100 100 100		0 0 0 0	0 0 0 0	
		Penilaian AKIP yang Profesional	100				100		0	0	
<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>											
<b>05.01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100	36	12	12	95	12	60	60	
05.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan PNS	100	36	12	12	98	12	60	60	
05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	100	36	12	12	96	12	60	60	
05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	100	36	12	12	92	12	60	60	
05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	36	12	12	71	12	60	60	
05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	36	12	12	86	12	60	60	
05.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100	36	12	12	82	12	60	60	
05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100	36	12	12	97	12	60	60	
05.01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	36	12	12	98	12	60	60	
05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman diluar jam dinas	100	36	12	12	70	12	60	60	
05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana Rapat dan Konsultasi keluar daerah	100	36	12	12	99	12	60	60	
<b>05.02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
05.02.03	Pembangunan gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	100	36	12	12	99	12	60	60	
05.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas/Operasional	100	36	12	12	98	12	60	60	

05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100	36	12	12	72	12	60	60
05.02.22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	100	36	12	12	77	12	60	60
05.02.24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100	36	12	12	89	12	60	60
05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	36	12	12	81	12	60	60
<b>05.05</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya sumber daya aparatur yang handal	100	36	12	12	100	12	60	60
<b>05.06</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	100	36	12	12	98	12	60	60
05.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan semesteran SKPD	100	36	12	12	72	12	60	60
05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya laporan keuangan Akhir Tahun	100	36	12	12	97	12	60	60
05.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD	Terbentuknya RKA dan DPA SKPD yang benar	100	36	12	12	67	12	60	60
<b>05.16</b>	<b>Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah</b>									
05.16.01	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Tersedianya peningkatan jumlah tanah milik pemerintah	100	36	12	12	96	12	60	60
<b>05.17</b>	<b>Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>									
05.17.02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga yang lebih baik	100	36	12	12	100	12	60	60
05.17.06	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya APBD Kab. Bengkulu Selatan	100	36	12	12	100	12	60	60
05.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	100	36	12	12	96	12	60	60
05.17.08	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya Perubahan APBD dengan baik dan benar	100	36	12	12	98	12	60	60
05.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Tersusunnya rancangan penjabaran perubahan APBD	100	36	12	12	98	12	60	60
05.17.10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100	36	12	12	98	12	60	60

05.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya penjabaran pertanggung jawaban APBD	100	36	12	12	100	12	60	60	
05.17.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang efektif dan efisien	100	36	12	12	74	12	60	60	
05.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		100	36	12	12	45	12	60	60	
05.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tercapainya peraturan peningkatan manajemen aset/ Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	100	36	12	12	82	12	60	60	
05.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		100				97		0	0	
05.17.20	Pemutakhiran data PBB	Terciptanya data yang lengkap dan akurat	100				100		0	0	
05.17.22	Pemutakhiran data Pajak Reklame	Terlaksananya dan tersusunnya data pajak reklame	100				97		0	0	
05.17.24	Peningkatan Penerimaan PBB	Terciptanya data PBB yang akurat	100				99		0	0	
05.17.26	Pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi keuangan kepada instansi vertikal	Terlaksananya tertib administrasi keuangan daerah	100				99		0	0	
05.17.28	Pengelolaan Gaji PNS se Kabupaten Bengkulu Selatan	Tersedianya daftar gaji PNS se Kab. B/S	100				97		0	0	
05.17.32	Penyusunan laporan keuangan semesteran pemerintah daerah	Tersedianya laporan keuangan yang baik se Kabupaten Bengkulu selatan	100				97		0	0	
05.17.33	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbentuknya PAD PBB dan Dana Perimbangan	100				97		0	0	
05.17.34	Penyusunan Laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan sosial	Tercapainya kinerja bantuan sosial	100				68		0	0	
05.17.36	Tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi uang dan kekayaan milik daerah	Tersedianya tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi uang dan kekayaan milik daerah	100				92		0	0	
05.17.40	Verifikasi rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	Terciptanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100				100		0	0	
05.17.43	Penyusunan laporan aset / barang milik daerah	Tersedianya laporang aset / barang milik daerah	100				85		0	0	
05.17.44	Penelusuran dan penyelesaian piutang daerah	Tersedianya laporang aset / barang milik daerah	100				98		0	0	
05.17.45	Penyusunan daftar kebutuhan Barang unit (DKBU) dan kebutuhan pemeliharaan barang unit	Tersedianya daftar kebutuhan Barang unit (DKBU) dan kebutuhan pemeliharaan barang unit	100				93		0	0	
05.17.47	Pengelolaan Belanja bantuan Sosial	Tersedianya Pengelolaan Belanja bantuan Sosial	100				67		0	0	
05.17.48	Workshop regulasi perencanaan penganggaran	Tersedianya Workshop regulasi perencanaan penganggaran	100				13		0	0	

05.17.49	Verifikasi pra dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan	Verifikasi pra dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan	100				98		0	0	
05.17.50	Tahapan Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah	Tersediahnya pengalihan PBB-P2	100				48		0	0	
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>											
	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan kinerja pegawai	100	36	12	12	80	12	60	60	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan kinerja pegawai	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan kinerja, keindahan dan keamanan kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan kinerja	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan kinerja	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan kinerja	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kinerja	100	36	12	12	86	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Informasi dan peningkatan wawasan pegawai	100	36	12	12	97	12	60	60	
	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan kinerja pegawai	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik	100	36	12	12	98	12	60	60	
	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	keindahan dan kenyamanan gedung kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran operasional kantor	100	36	12	12	98	12	60	60	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peningkatan kinerja pegawai	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Pengadaan mesin kartu/absensi	peningkatan disiplin dan kinerja pegawai	100	36	12	12	89	12	60	60	
	<b>FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS</b>										
	Pemulangan pegawai yang pensiun	Realisasi pemulangan pegawai yang purna tugas	100	36	12	12	88	12	60	60	
	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Realisasi pemulangan pegawai yang tewas	100	36	12	12	12	12	60	60	
	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersediaanya bahan evaluasi capaian dan iktisar kinerja SKPD	100	36	12	12	98	12	60	60	

	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersediaanya bahan evaluasi keuangan SKPD	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan pertanggungjawaban keuangan BKD	100	36	12	12	92	12	60	60	
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Tersedianya kegiatan dan program BKD	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>										
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah	Pegawai-pegawai yang telah mengikuti Diklat Prajabatan CPNS	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV, II, dan II	100	36	12	12	98	12	60	60	
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Peningkatan SDM PNS Kabupaten Bengkulu Selatan	100	36	12	12	79	12	60	60	
	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>										
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Terlaksana pembinaan dan pengembangan aparatur	100	36	12	12	98	12	60	60	
	Seleksi penerimaan CPNS	Peningkatan standar pelayanan aparatur daerah	100	36	12	12	94	12	60	60	
	Pembangunan/pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah	Terpenuhinya kebutuhan keakuratan dan informasi pegawai	100	36	12	12	97	12	60	60	
	Proses penanganan Kasus -kasus pelanggaran disiplin PNS	Penyelesaian kasus-kasus PNS	100	36	12	12	99	12	60	60	
	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Perencanaan Diklat	100	36	12	12	82	12	60	60	
	Pengelolaan administrasi dan persiapan purna tugas PNS	Proses Pensiun PNS	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil	Peningkatan mental dan disiplin PNS di lingkungan Pemkab BS	100	36	12	12	100	12	60	60	
	penyusunan buku kepegawaian dalam angka	terpenuhinya informasi data pegawai	100	36	12	12	93	12	60	60	
	pemberian penghargaan kepada PNS yang rajin dan disiplin	oftimalisasi upaya pemberian disiplin aparatur	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Bimbingan teknis peningkatan angka kredit jbatan fungsional	PNS yang profesional	100	36	12	12	97	12	60	60	
<b>KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>											
	<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa komunikasi, SDA & Listrik	Tersediannya Komunikasi SDA & Lingkungan	100	3	1	1	89	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Terlaksanannya Administrasi Keuangan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanannya Kebersihan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK kantor yang memadai	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Brg Cetak & Penggandaan	Tersedianya Brg Cetakan & Penggandaan	100	3	1	1	100	1	5	5	



	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	Tersedianya Komponen Instalasi listrik kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	1	1	55	1	5	5	
	Penyediaan Bacaan & Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan makanan & Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Koord.&Konsult ke Luar Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>										
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkap.Gd.Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendrn.Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	3	1	1	97	1	5	5	
	<b>Program peningkatan Pengemb.Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keu.</b>										
	penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>										
	workshop / Bimtek dan Penyusunan SOP	Terlaksananya Workshop/ Bimtek dan Penyusunan SOP	100	3	1	1	97	1	5	5	
<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa telepon, air dan Listrik	100				64		0	0	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dan terselenggaranya administrasi Keuangan	100				50		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya Kebersihan Kantor	100				63		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dan terselenggaranya ATK	100				100		0	0	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya dan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100				83		0	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				8		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Buku-buku dan bahan Bacaan	100				59		0	0	
	Rapat-rapat Konsultasi dan	Terlaksananya rapat-rapat	100				81		0	0	

Koordinasi Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah									
<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100				69		0	0	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksanya Rehab Gedung Kantor	100				28		0	0	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Smesteran	100				0		0	0	
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD	Terselenggaranya Pembuatan RKA/DPA	100				51		0	0	
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>										
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan	Terpiluhnya Kepala Desa Definitif Dan Terbentuknya Orga Masy	100				80		0	0	
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersedianya data Desa dan Kelurahan	100				52		0	0	
Administrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PAP PNPM)	Tersedianya Dukungan Adm dan Pengawasan PNPM	100				74		0	0	
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>										
Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG	100				21		0	0	
<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</b>										
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terselenggaranya Musyawarah Pembangunan Desa	100				78		0	0	
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lommba Desa/Kelurahan	100				100		0	0	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>										
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang manajemen Pemerintahan Desa	Peningkatan Pemb. Manajemen Pemdes	100				94		0	0	
Penyediaan Jasa Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jasa Asuransi Kades	100				99		0	0	
Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa	Tersedianya Penghargaan Kades	100				85		0	0	
<b>Program Peningkatan Peran</b>										

	<b>Perempuan di Perdesaan</b> Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	Terselenggaranya Bimtek Kelompok SPP	100				78		0	0	
<b>KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Terselesaikannya Administrasi Keuangan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman di Luar Jam Dinas	Tersedianya Makan dan Minuman Luar jam Kerja kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Oprasional Kantor	100	3	1	1	99	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</b>										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja yang baik	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran/dokumen pelaksana Anggaran	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Penyelamatan dan</b>										

	<b>Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</b> Pendataan dan Penataan Dokumentasi/Arsip Daerah <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Keperpustakaan</b> Pemasarakat Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Mengembangkan Minat dan Budaya Baca Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Pengadaan bahan pustaka perpustakaan Perpustakaan Keliling Pengadaan Sarana Pengelolaan Data Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah  Terlaksananya minat dan kebiasaan membaca dalam mewujudkan masyarakat pembelajar Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca Tersedianya bahan bacaan dan ilmu pengetahuan Terlaksananya Perpustakaan Keliling Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengelolaan Data perpustakaan umum daerah & perpustakaan Desa.	100 100 100 100 100 100	3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	100 100 100 100 100 100	1 1 1 1 1 1	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	
<b>DINAS PERTANIAN</b>											
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi SD Air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya administrasi surat menyurat kantor Bukti pembayaran sarana komunikasi, air dan listrik Terlaksananya administrasi keuangan kantor Jasa non PNS alat-alat kebersihan kantor Tersedianya ATK kegiatan dinas Barang cetak dan penggandaan Alat-alat listrik Bacaan-bacaan sumber informasi Makanan penunjang Kegiatan Biaya oprasional kegiatan dinas Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	104 84 100 100 119 106 100 185 100 98 120	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Pengadaan BBM	100	3	1	1	102	1	5	5	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										
Penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan, monitoring	100	3	1	1	100	1	5	5	
Penyusunan laporan keuangan dan semesteran	dan laporan kegiatan	100				124		0	0	
Keg.Penyusunan RKA/DPA	Tersedianya Dokumen RKA , DPA,RKAP dan DPPA	100	3	1	1	82	1	5	5	
<b>PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>										
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kebijakan subsidi Pertanian	Tersusunnya Dokumen perencanaan, monitoring	100				100		0	0	
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tersediannya kursus/pelatihan teknis	100				71		0	0	
Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi, Palawija	Tersediannya intensifikasi tanaman padi, palawija	100				98		0	0	
Pengembangan pembenihan pembibitan	Tersedianya pembenihan bibit	100				74		0	0	
Pengembangan sistem Informasi Pasar	Oprasional petugas statistik pertanian, OP BPP Kota	100	3	1	1	100	1	5	5	
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Tersedianya Sumber Daya Pertanian	100				74		0	0	
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Tersediannya Sarana dan Prasarana pertanian/perkebunan tepat guna	100				100		0	0	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>										
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan	100	3	1	1	88	1	5	5	
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan	100				46		0	0	
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Produksi	Tersedianya pembangunan/rehabilitasi jalan produksi	100	3	1	1	98	1	5	5	
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGAGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>										

	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pengadaan obat-obatan dan peralatan, pertemuan teknis peternakan, peralatan IB Pengiriman teknis pelatihan IB	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN</b>										
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pertemuan Teknis Peternakan, Pengadaan Bibit Straw, Operasional RPH	100				96		0	0	
<b>KANTOR KETAHANAN PANGAN</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	tercapainya kebutuhan jasa selama 1 tahun	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Sarana dan prasarana untuk kegiatan Terpenuhi	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan PNS & adm. Perkantoran terpenuhi	100				100		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya sarana kebersihan kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Perkantoran	Tersedianya sarana kerja kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya sarana kerja kantor yang memadai	100				100		0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan pembangunan kantor	Persediaan komponen listrik di kantor	100				100		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100				94		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & minuman kegiatan kantor	100				100		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Tercapainya tujuan kerja PNS KKP Kab. B/S	100				100		0	0	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>										
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100				100		0	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;	Perawatan kendaraan lebih baik	100				92		0	0	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana kerja dikantor yang baik dan Optimal	100				100		0	0	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Dan Keuangan</b>										
	Penyusunan Lap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terpenuhi sistem pelaporan di SKPD	100				100		0	0	
	Penyusunan Laporan Semesteran	Terpenuhi sistem pelaporan semesteran SKPD	100				100		0	0	

4	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Terpenuhi sistem pelaporan akhir Tahun SKPD	100				100		0	0	
	Penyusunan RKA dan DPA	Adanya RKA & DPA SKPD	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>										
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Pangan	Terlaksananya Pengumpulan data PPH, sosialisasi P2KPG, Lomba 3BA	100				100		0	0	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Prog. Bina Desa & Pemetaan kerawanan Pangan	100				100		0	0	
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Lumbung Pangan Desa	100				100		0	0	
<b>DINAS KEHUTANAN DAN ESDM</b>											
<b>2.02. 2.02.01 .01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
2.02. 2.02.01 .01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komonikasi sumber Daya air dan listrik	100	36	12	12	93	12	60	60	
2.02. 2.02.01 .01 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
2.02. 2.02.01 .01 .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100	36	12	12	100	12	60	60	
2.02. 2.02.01 .01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	18	6	6	99	6	30	30	
2.02. 2.02.01 .01 .15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100	3	1	1	89	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah	100	3	1	1	99	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .01 .20	Penetapan Angka kredit	Terlaksananya penetapan angka kredit	100	33	11	11	0	11	55	55	
<b>2.02. 2.02.01 .02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
2.02. 2.02.01 .02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	100	3	1	1	93	1	5	5	
2.02. 2.02.01 .02 .28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralataorn gedung kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	



2.02. 2.02.01 .05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
2.02. 2.02.01 .05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100						0	0	
2.02. 2.02.01 .06	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Target Kinerja dan Keuangan</b>									
2.02. 2.02.01 .06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	100	6	2	2	99	2	10	10	
2.02. 2.02.01 .06.05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA -DPA) SKPD	100	12	4	4	100	4	20	20	
2.02. 2.02.01 .16	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>									
2.02. 2.02.01 .16.04	Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	100	45	15	15	97	15	75	75	
2.02. 2.02.01 .16.06	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan	100	375	125	125	91	125	625	625	
2.02. 2.02.01 .17	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>									
2.02. 2.02.01 .17.05	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak kerusakan Hutan	100	225	75	75	98	75	375	375	
2.02. 2.02.01 .17.07	Penyelenggaraan Operasi Rutin/Berkala Pengamanan Hutan	100	90	30	30	99	30	150	150	
2.02. 2.02.01 .20	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Baton</b>									
2.02. 2.02.01 .20.02	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.03. 2.02.01 .15	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>									
2.03. 2.02.01 .15.08	Pembinaan dan Pengawasan Pangkalan Minyak Tanah, SPPBU dan Elpiji	100	3	1	1	99	1	5	5	
2.03. 2.02.01 .15.08	Pendataan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat	100	3	1	1	99	1	5	5	
2.03. 2.02.01 .16	<b>Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang</b>									

2.03. 2.02.01 .16.04	<b>Berpotensi Merusak Lingkungan</b> Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Geologi	Peta rawan bencana geologi untuk wilayah Kab. Bengkulu Selatan	100	3	1	1	97	1	5	5	
<b>2.03. 2.02.01 .17</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>										
2.03. 2.02.01 .17.01	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Tertibnya perizinan bidang ketenagalistrikan	100	3	1	1	100	1	5	5	
2.03. 2.02.01 .17.03	Pemasangan Lampu/Dekorasi Kota	Terpasangnya lampu penerangan jalan umum	100	1722	574	574	95	574	2870	2870	
2.03. 2.02.01 .17.04	Pemeliharaan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Terpeliharanya Penerangan Jalan dan Lampu Hias	100	600	200	200	14	200	1000	1000	
<b>BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penerangan dan komunikasi di kantor	100	3	1	1	94	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya sarana kerja di kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan sarana kerja di kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik di kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana & perl. Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan di kalangan PNS Penyuluh	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya makan dan minum untuk rapat di kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penetapan Angka Kredit	Terlaksananya Penetapan penilaian Angka Kredit PPL	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Terawatnya ruangan gedung dan Pagar Halaman Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	100	3	1	1	100	1	5	5	

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Terawatnya sarana kerja secara Baik dan optimal	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Pelatihan BinteK dan pelatihan bagi PNS dilingk. BP4K	100	6	2	2	100	2	10	10	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Terlaksanya Pelaksanaan sistem Pelaporan di SKPD	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksanya Meningkatkan pengetahuan dan Keterampilan Petani	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani <b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	Terlaksanya peningkatan pengetahuan petani Tetang Kelembagaan	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah <b>Program Peningkatan Penerapan Teknlg Pertanian/perkebunan</b>	Terlaksanya pelaksanaan promosi hasil Pertanian perikanan & Perkebunan	100	3	1	1	99	1	5	5	
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian dan Petani Pelaku Agribisnis lainnya	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan <b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan</b>	Penyusunan laporan pelaksanaan Program dan Terevaluasinya Kinerja PPL	100	3	1	1	100	1	5	5	
	1Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan	Tersusunnya program dan kebijakan PPL Identifikasi Informasi Pertanian serta Gerakan RDK / RDKK di Poktan	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA</b>											
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase pembayaran biaya telpon, air dan listrik	100	3	1	1	33	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Optimalnya administrasi keuangan	100	3	1	1	80	1	5	5	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan	100	3	1	1	64	1	5	5	

	Penyediaan ATK	Kebersihan	100	3	1	1	75	1	5	5	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	3	1	1	48	1	5	5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan yang memadai	100	3	1	1	68	1	5	5	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Konsumsi Petugas Kebersihan	100	3	1	1	56	1	5	5	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	3	1	1	88	1	5	5	
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur	100	3	1	1	58	1	5	5	
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur	100	3	1	1	93	1	5	5	
	Rehabilitasi sedang / berat Kendaraan Dinas / Operasional	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur	100	3	1	1	45	1	5	5	
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	3	1	1	83	1	5	5	
	<b>Pengembangan Perumahan</b>										
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Tersedianya Izin Mendirikan Bangunan	100	3	1	1	87	1	5	5	
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Jasa Administrasi Surat Menyurat	tersedianya benda- benda pos dan lainnya	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	36	12	12	85	12	60	60	
	Penyediaan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana & perl. Kantor	100	36	12	12	43	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di kalangan PNS Penyuluh	100	36	12	12	80	12	60	60	
	Penyediaan makan minum	Tersedianya makan dan minum untuk rapat di kantor	100	36	12	12	32	12	60	60	

2.	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	100	36	12	12	96	12	60	60	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/oprasional	Terawatnya Kendaraan Bermotor/ Dinas	100	36	12	12	96	12	60	60	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100	9	3	3	100	3	15	15	
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung kantor	terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100	36	12	12		12	60	60	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian target kinerja</b>										
	Penyusunan Rencana Kerja (RKA dan DPA) SKPD	Tersusunya RKA dan DPA SKPD	100	3	1	1	100	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pendayagunaan Sumber daya Laut</b>										
	Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Terselenggaranya Sosialisasi UU Perikanan	100	9	3	3	100	3	15	15	
	<b>Program Pengembangan Budi daya Perikanan</b>										
	Pengadaan Pakan	tersedianya Pakan Ikan	100	9	3	3	100	3	15	15	
	Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dan bina Desa	Desa Binaan yang kreatif dan Kompetitif	100	9	3	3	100	3	15	15	
	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>										
	Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kelompok Nelayan Yang Terampil	100				100		0	0	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	terlaksananya Monev kegiatan pembangunan	100	30	10	10	100	10	50	50	
	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>										
	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan	100	30	10	10	100	10	50	50	
	Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan P2HP (PUMP-P2HP)	Meningkatkan taraf hidup POKLAHSAR	100	30	10	10	100	10	50	50	
<b>BADAN NARKOTIKA KABUPATEN</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100	3	1	1	28	1	5	5	

	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100	3	1	1	37	1	5	5	
	Penyediaan alat tulis kantor		100	3	1	1	56	1	5	5	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100	3	1	1	61	1	5	5	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	3	1	1	26	1	5	5	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	3	1	1	83	1	5	5	
	Penyediaan makan dan minum		100	3	1	1	58	1	5	5	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		100	3	1	1	48	1	5	5	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>										
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional		100	3	1	1	27	1	5	5	
	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)</b>										
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda		100	3	1	1	98	1	5	5	
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>										
	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba		100	3	1	1	2	1	5	5	
	Operasi pemberantasan penyakit sosial (PEKAT)		100	3	1	1	0	1	5	5	
<b>KECAMATAN KOTA MANNA</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi Air dan Listrik	100				12		0	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya dan Tersediaanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				0		0	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dan terselenggaranya administrasi Keuangan	100				47		0	0	

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Dan terpeliharanya Kebersihan Kantor	100				65		0	0	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dan Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100				42		0	0	
Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tersedianya dan Terselenggaranya dan tersedianya Barang cetakan dan Pengadaan	100				60		0	0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya dan Terpenuhiya Kebutuhan Listrik	100				53		0	0	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan perundang - undangan	Tersedianya koran dan buku - buku perundang - undangan Dan bahan bacaan	100				22		0	0	
Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman	100				45		0	0	
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100				4		0	0	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	Terpelihanya Kendaraan dinas	100				78		0	0	
<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
Penyusunan Laporan Semesteran	Tersesunnya Laporan keuangan semesteran	100				0		0	0	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Semester	100				0		0	0	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	100				0		0	0	
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersusunnya LAKIP	100				100		0	0	
<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>										
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	100				0		0	0	
<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>										
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terciptanya pemuda yang mandiri	100				0		0	0	
<b>Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa</b>										
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan	100				100		0	0	



<b>Pembinaan Kelompok Masyarakat</b> <b>Pembangunan Desa</b> <b>Program Peningkatan efisiensi</b> <b>Perdagangan Dalam Negeri</b> Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang / produk <b>Program Peningkatan Kapasitas</b> <b>Aparatur Pemerintahan Desa</b> Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah <b>Program Pencegahan Dini dan</b> <b>Penanggulangan Korban Bencana</b> <b>Alam</b> Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam <b>Program Penataan Administrasi</b> <b>kependudukan</b> Peningkatan Pelayanan Publik dalm bidang kependudukan sosialisasi kebijakan kependudukan		100				0		0	0	
	Terlaksananya Pasar Murah	100				0		0	0	
	Terciptanya Aparatur Desa yang terampil dalam bidang pengelolaan Keuangan	100				0		0	0	
	-	100				0		0	0	
	-	100				55		0	0	
	-	100				51		0	0	
<b>KECAMATAN PASAR MANNA</b>										
<b>Pelayanan Administrasi</b> <b>Perkantoran</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan ATK Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Listrik Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah <b>Peningkatan Sarana dan</b> <b>Prasarana Aparatur</b> Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala										
	Terlaksananya surat menyurat	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya telepon, air dan listrik	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Terlaksananya adm.keuangan dengan baik	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya peralatan kebersihan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tidak adanya hambatan dalam adm. perkantoran	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya Komponen Listrik	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya koran dan bacaan lainnya	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya nasi kotak dan kue kotak	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya SPPD dalam dan keluar daerah	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Terlaksananya rehab kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
		100	36	12	12	100	12	60	60	
		100	36	12	12	100	12	60	60	
	Tersedianya suku cadang	100	36	12	12	100	12	60	60	

	Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan									
	<b>Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya biaya pembuatan laporan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>										
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Tersedianya biaya pembuatan E-KTP	100	36	12	12	90	12	60	60	
	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>										
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbangdes / kelurahan	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>										
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Tersedianya bahan pokok murah	100	36	12	12	100	12	60	60	
	<b>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>										
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kepada masyarakat	Terciptanya ketenangan di masyarakat	100	36	12	12	100	12	60	60	
<b>KECAMATAN MANNA</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat	100	36	12	12	59	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja telepon, air dan listrik kantor	100	36	12	12	51	12	60	60	
	Penyediaan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrai keuangan	100	36	12	12	75	12	60	60	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercukupinya alat kebersihan Kantor	100	36	12	12	63	12	60	60	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	100	36	12	12	83	12	60	60	
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	100	36	12	12	48	12	60	60	
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik untuk kantor	100	36	12	12	100	12	60	60	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan surat kabar	100	36	12	12	75	12	60	60	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman	100	36	12	12	81	12	60	60	
	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya perjalanan dinas ke luar daerah	100	36	12	12	48	12	60	60	

<div>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</div> <div>Pembangunan gedung kantor</div> <div>Pengadaaan perlengkapan kantor</div> <div>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</div> <div>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</div> <div>Penyusunan Lakip</div> <div>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</div> <div>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</div> <div>Penyusunan RKA dan DPA</div> <div>Penyusunan Renstra</div> <div>Pembinaan dan fasilitasi APB Desa</div> <div>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</div> <div>Pengembangan Pasar dan Distribusi Pasar</div> <div>Program penataan administrasi kependudukan</div> <div>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</div>	Tercukupinya Kantor atau Balai Desa yang Representatif	100	6	2	2	32	2	10	10	
	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Tercukupinya pemeliharaan mobil dan motor dinas	100	36	12	12	76	12	60	60	
	Terpenuhinya laporan LAKIP dan TAPKIN	100	6	2	2	100	2	10	10	
	Tercukupinya laporan keuangan semesteran	100	6	2	2	100	2	10	10	
	Tercukupinya laporan keuangan akhir tahun	100	3	1	1	0	1	5	5	
	Tercukupinya RKA/DPA-SKPD	100	12	4	4	100	4	20	20	
	Terpenuhinya laporan RENSTRA	100	3	1	1	0	1	5	5	
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan APB Desa	100	51	17	17	100	17	85	85	
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang/produk	100	3	1	1	100	1	5	5	
	Terwujudnya Pelayanan Kependudukan yang Prima	100	18	6	6	69	6	30	30	
KECAMATAN PINO RAYA										
<div>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</div> <div>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik</div> <div>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</div> <div>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</div> <div>Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor</div> <div>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>- Penyediaan Makanan dan Minuman</div>		100				33		0	0	
		100				31		0	0	
		100				74		0	0	
		100				63		0	0	
		100				53		0	0	
		100				34		0	0	
		100				100		0	0	
		100				67		0	0	
		100				100		0	0	

	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		100				19		0	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100				83		0	0	
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100				100		0	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>										
	- Penyusunan Pelaporan Capiain Kinerja dan dan Iktisar Realisasi Kinerja		100				100		0	0	
	- Penyusunan Rencana capaian kerja anggaran dan Dokumen		100				0		0	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>										
	- Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan		100				100		0	0	
	- Lomba Desa		100				100		0	0	
	<b>PROOGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>										
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan		100				53		0	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DALAM NEGERI</b>										
	- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk		100				93		0	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTA DESA</b>										
	- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa		100				100		0	0	
<b>KECAMATAN PINO</b>											
<b>1.20. 1.20.15 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>										
1.20. 1.20.15 . 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100	3	1	1	75	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 07	Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	3	1	1	72	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	3	1	1	81	1	5	5	

1.20. 1.20.15 . 01. 10	Peyediyaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	3	1	1	53	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 11	Penyediyaan Barang Cetak & Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	100	3	1	1	58	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 12	Penyediyaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 15	Penyediyaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	3	1	1	83	1	5	5	
1.20. 1.20.15 . 01. 17	Penyediyaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum	100	3	1	1	100	1	5	5	
1.20. 1.20.16 . 01. 18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>1.20. 1.20.15. 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>									
1.20. 1.20.15. 02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100	3	1	1	89	1	5	5	
1.20. 1.20.15. 02. 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100	3	1	1	100	1	5	5	
1.20. 1.20.15. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	100	3	1	1	72	1	5	5	
<b>1.20. 1.20.15. 06</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
1.20. 1.20.15. 06. 02	Penyusunan Laporan Semesteran	Tersedianya Penyusunan Laporan Semesteran	100	3	1	1	76	1	5	5	
1.20. 1.20.15. 06. 04	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	100	3	1	1	100	1	5	5	
1.20. 1.20.16. 06. 05	Penyusunan RKA - DPA	Dilaksanakannya Penyusunan RKA - DPA	100	3	1	1	96	1	5	5	
<b>1.20. 1.20.15. 15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>									
1.20. 1.20.15. 15. 08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Beroperasinya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	100	3	1	1	77	1	5	5	
<b>1.20. 1.20.15. 18.</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri</b>									
1.20. 1.20.15. 18. 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	Terlaksananya Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>1.20. 1.20.15. 22.</b>	<b>Program Pencegahan Dini &amp; Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Program Pencegahan Dini &amp; Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>									
1.20. 1.20.15. 22. 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Dilaksanakannya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	100	3	1	1	100	1	5	5	
<b>KECAMATAN ULU MANNA</b>											
	<b>Program Pelayanan administrasi</b>										

	<b>perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa listrik dan air	100	3	1	1	4	1	5	5	
	Penyediaan adm. Keuangan	tersedianya jasa adm. Keuangan	100	3	1	1	25	1	5	5	
	Pelayanan jasa kebersihan kantor	terciptanya lingkungan kantor yang bersih	100	3	1	1	21	1	5	5	
	Penyediaan alat tulis kantor	persentase jumlah alat tulis yang dibutuhkan	100				33		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100				38		0	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	tersedianya alat listrik yang dibutuhkan	100				46		0	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100				20		0	0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum pegawai	100				23		0	0	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	terlaksananya dinas rapat dan konsultasi	100				17		0	0	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
	Pembangunan Gedung Kantor Desa	tersedianya gedung kantor yang memadai	100				0		0	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	100				8		0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor yang maksimal	100				0		0	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	termanfaatnya kendaraan dinas/opersional dengan maksimal	100				33		0	0	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	tersedianya kebutuhan khusus hari-hari tertentu	100				0		0	0	
	<b>Peningkatan Pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
	Penyusunan laporan semesteran	Tersedianya laporan semesteran	100				0		0	0	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya laporan akhir tahunSKPD akuntabilitas	100				0		0	0	
	Penyusunan RKA/ DPA SKPD	Tersedianya RKA/DPA	100				0		0	0	
	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Tersedianya penyampaian laporan kinerja SKPD	100				0		0	0	
	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>										
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam	tersedianya data pendataan	100				0		0	0	

	Bidang Kependudukan	jumlah penduduk menjelang diberlakukanya KTP elektronik									
	<b>Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b> musrenbang desa tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	terlaksananya musrenbangdes / kelurahan dan kecamatan	100				100		0	0	
	<b>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b> sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT dan undang-undang KDRT pada aparat kecamatan, kelurahan, desa	terwujudnya perlindungan perempuan terhadap perempuan	100				0		0	0	
	<b>Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b> Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	kebutuhan barang murah masyarakat miskin	100				0		0	0	
	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b> Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	100				0		0	0	
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b> Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Pencegahan narkoba dan minuman keras	100				0		0	0	
	<b>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b> Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kepada masyarakat	terjalinya koordinasi daerah rawan bencana wilayah kec. Ulu manna	100				0		0	0	
<b>KECAMATAN BUNGA MAS</b>											
<b>1.20.1.20.17.01.01</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>										
	Penyediaan adm. Keuangan	tersedianya jasa adm. Keuangan	100	3	1	1	25	1	5	5	
	Pelayanan jasa kebersihan kantor	terciptanya lingkungan kantor yang bersih	100	3	1	1	38	1	5	5	
	Penyediaan alat tulis kantor	persentase jumlah alat tulis yang dibutuhkan	100				47		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100				44		0	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	tersedianya alat listrik yang dibutuhkan	100				46		0	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan	tercukupinya kebutuhan bahan	100				25		0	0	



	peraturan perundang-undangan	bacaan dan peraturan perundang-undangan								
	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum pegawai	100				28		0	0
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	terlaksananya dinas rapat dan konsultasi	100				42		0	0
<b>1.20.17.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
	Pembangunan Gedung Kantor Desa	tersedianya gedung kantor yang memadai	100				0		0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	100				32		0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor yang maksimal	100				0		0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	termanfaatnya kendaraan dinas/opersional dengan maksimal	100				28		0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		100				67		0	0
<b>1.20.1.20.17.01.02</b>	<b>Peningkatan Pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
<b>1.10.1.20.17.01.15</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>									
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	tersedianya data pendataan jumlah penduduk menjelang diberlakukanya KTP elektronik	100				0		0	0
<b>1.22.1.20.17.01.15</b>	<b>Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>									
	musrenbang desa tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	terlaksananya musrenbangdes / kelurahan dan kecamatan	100				90		0	0
<b>1.06.1.20.17.01.18</b>	<b>Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>									
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	kebutuhan barang murah masyarakat miskin	100				0		0	0
<b>1.19.1.20.17.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>									
	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Pencegahan narkoba dan minuman keras	100				0		0	0
<b>KECAMATAN KEDURANG ILIR</b>										
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100				35		0.00	0.00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100				100		0.00	0.00

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100				100		0.00	0.00	
	Penyediaan alat tulis kantor	100				100		0.00	0.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100				100		0.00	0.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100				100		0.00	0.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100				100		0.00	0.00	
	Penyediaan makanan dan minuman	100				100		0.00	0.00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100				100		0.00	0.00	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
	Pembangunan gedung kantor	100				100		0.00	0.00	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	100				100		0.00	0.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100				100		0.00	0.00	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
	Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100				100		0.00	0.00	
	Pelaporan Keuangan Semester									
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100				100		0	0	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100				100		0.00	0.00	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD	100				100		0	0	
<b>1.10.1.20.17.01.15</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>									
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	100				100		0.00	0.00	
<b>1.22.1.20.17.01.15</b>	<b>Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>									
	musrenbang desa tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	100				100		0.00	0.00	
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>									
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	100				100		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.06.1.20.17.01.18</b>	<b>Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>									

1.06 . 1.20.20 . 21 . 20	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	terselenggaranya pasar murah	100				100		0	0	
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>										
	Penyusunan RENSTRA SKPD		100						0	0	
<b>KECAMATAN KEDURANG</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		100	300	100	100	79	100	500	500	
	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan alat tulis kantor		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan komponen Instansi Listrik		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan Peralatan Kantor		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyediaan makan dan minuman		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		100	300	100	100	100	100	500	500	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
	Pembangunan Gedung Kantor Desa		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Pemeliharaan rutin/berkala kend.Dinas/Oprasional		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		100	300	100	100	100	100	500	500	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyusunan RKA/DPA		100	300	100	100	100	100	500	500	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD		100	300	100	100	100	100	500	500	
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>										

	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	100	300	100	100	86	100	500	500	
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>									
	Pengembangan Pasar dan distribusi Pasar	100	300	100	100	100	100	500	500	
<b>KECAMATAN AIR NIPIS</b>										
	<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>									
	Peny. Jasa Kom, Sumber Daya Air dan Listrik	100				39		0	0	
	Peny jasa peralatan dan Perlengkapan	100				0		0	0	
	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	100				50		0	0	
	Penyediaan alat tulis	100				60		0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	100				40		0	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	100				43		0	0	
	Penyediaan makan minum	100				58		0	0	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100				42		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100				58		0	0	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100				87		0	0	
	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>									
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100				0		0	0	
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>									
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informal Perdagangan	100				0		0	0	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informal Perdagangan	100				100		0	0	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	100				0		0	0	
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>									
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	100				0		0	0	
	<b>Program Peningkatan</b>									

	<b>Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>										
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	100					0		0	0	
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	100					100		0	0	
<b>KECAMATAN SEGINIM</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi Air dan Listrik	100				9		0	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya dan Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				0		0	0	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya dan terselenggaranya administrasi Keuangan	100				49		0	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya Dan terpeliharanya Kebersihan Kantor	100				30		0	0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya dan Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100				46		0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Terselenggaranya dan tersediannya Barang cetakan dan Pengadaan	100				78		0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya dan Terpenuhiya Kebutuhan Listrik	100				67		0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan perundang - undangan	Tersediannya koran dan buku - buku perundang - undangan Dan bahan bacaan	100				50		0	0	
	Penyediaan Makan dan Minum	Tersediannya makanan dan minuman	100				100		0	0	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100				61		0	0	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
	pembangunan Gedung kantor		100				0		0	0	
	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	Terpelihanya Kendaraan dinas	100				67		0	0	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
	Penyusunan Laporan Semesteran	Tersesunnya Laporan keuangan semesteran	100				0		0	0	

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Semester	100				0		0	0	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	100				100		0	0	
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Tersusunnya LAKIP	100				100		0	0	
<b>Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>										
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / produk	Terlaksananya Pasar Murah	100				0		0	0	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>										
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terciptanya Aparatur Desa yang terampil dalam bidang pengelolaan Keuangan	100				100		0	0	
<b>Program Penataan Administrasi kependudukan</b>										
Peningkatan Pelayanan Publik dalm bidang kependudukan	-	100				46		0	0	
sosialisasi kebijakan kependudukan	-	100				170		0	0	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		100				0		0	0	
<b>Program Peningkatan Pemantauan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b>										
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban masyarakat	100				100		0	0	

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dan mempengaruhi capaian keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah berhubungan dengan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan terutama SKPD terkait dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

#### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan menemui beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi terbaiknya, sehingga permasalahan-permasalahan daerah tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah ke depannya.

Beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada tahun 2014 mencapai angka 21,91 % dan merupakan angka kemiskinan tertinggi kedua diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Perlu dilakukan strategi pengurangan Kemiskinan (**Propour**) untuk menekan angka kemiskinan di Bengkulu Selatan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna menurunkan angka pengangguran (**Projob**) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan adanya strategi pengurangan kemiskinan dan kebijakan menekan angka kemiskinan maka dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian (**Progrowth**).
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Disamping itu peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pengajar masih harus dilakukan. Perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan perlu ditingkatkan sehingga pembangunan bidang pendidikan bisa menjangkau semua demi memenuhi amanat Inpres 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan.
3. Masih rendah nya Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat mendukung meningkatnya pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Maka perlu dilakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan cara Pendataan ulang objek-objek pajak maupaun objek retribusi yang ada.
4. Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter umum maupun dokter spesialis serta kurang memadainya kualitas sarana-prasarana kesehatan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pada daerah-daerah terpencil. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang memadai serta penyediaan tenaga kesehatan berkualitas yang cukup.
5. Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan terutama yang bergerak pada sektor-sektor potensial penyumbang PDRB. Sampai saat ini baru sektor pertanian dengan sub sektor perkebunan yang mampu menarik investor untuk mengelola dan mengembangkan potensi sektor perkebunan tersebut, dimana telah berdiri 2 (dua) perusahaan pengolahan kelapa sawit (CPO). Namun sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa masih membutuhkan pengembangan.
6. Masih terbatasnya serta rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan. Banyak ruas jalan baik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang telah mengalami kerusakan sehingga menghambat arus transportasi.



7. Masih rendahnya pengelolaan infrastruktur dasar lainnya terutama di bidang pertanian dan perkebunan yaitu jalan sentra produksi dan irigasi pertanian kurang memadai sehingga menghambat distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian.
8. Masih rendahnya kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan dan peningkatan peran serta perempuan menuju tercapainya pembangunan berbasis Gender.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan

**Tabel 2.20**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan**

No	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1.	Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi diantara kementerian/ lembaga	Masih kuatnya ego sektoral antar SKPD dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan	
2.	Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan antara eksekutif dan legislative	Masih perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi serta kerjasama antara eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah	
3.	Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	
4.	Keterbatasan sumber daya energy listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal	Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan	
5.	Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah	Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah tangga serta memanfaatkan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
6.	Kualitas SDM dan kemiskinan	Perlunya mempertahankan swasembada pangan	
7.	Kualitas birokrasi dan tata kelola	Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan	
8.	Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil	Perlunya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana mengingat Provinsi Bengkulu merupakan daerah rawan bencana	
9.	Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		

### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

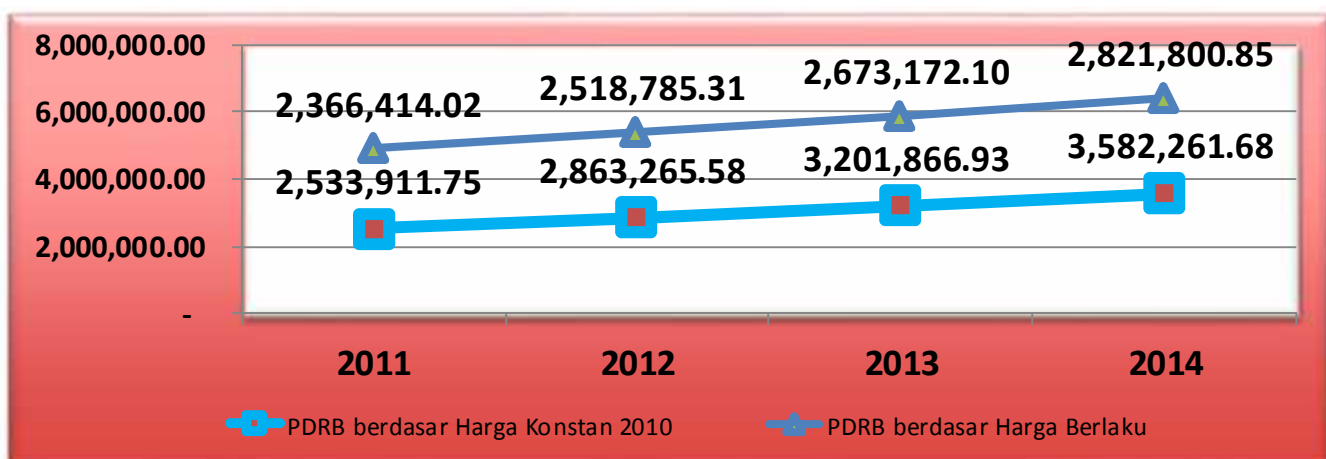
### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu harus dibangun pondasi yang kuat sehingga tercipta kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (*Pro-Growth*) yang dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui: (1) menekan angka kemiskinan (*Pro-Poor*); (2) menurunkan tingkat kemiskinan (*Pro-Job*); dan (3) memperkuat kebijakan yang berwawasan lingkungan (*Pro-Environment*) untuk mendukung pengembangan program ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan masih bertumpu pada sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB masih sangat dominan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian di suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2009-2013, kinerja perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2011 s/d 2014 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi diantaranya adalah melaksanakan revitalisasi pertanian

terutama perkebunan, pengembangan produksi perikanan dan peningkatan pengelolaan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) terutama jalan-jalan sentra produksi pertanian. Disamping itu juga dilakukan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik investor, memberikan jaminan kemudahan berusaha dan berinvestasi serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

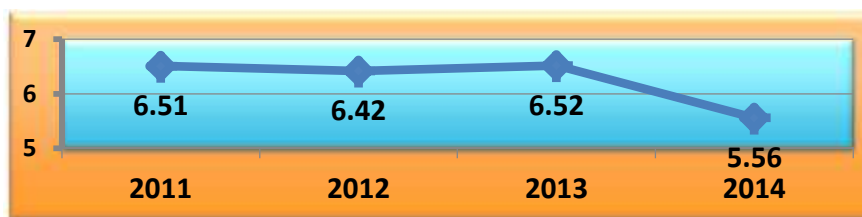
#### A. Kondisi Ekonomi Daerah

##### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional. Secara makro kondisi ekonomi tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun krisis ekonomi di Eropa masih dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang kurang baik. Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,75 persen dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,0 persen pada tahun 2019 dimana Pertumbuhan Ekspor Nonmigas pada tahun 2015 sebesar 9,0 persen sedangkan Pertumbuhan Impor nonmigas sebesar 6,1 persen. Proyeksi Pertumbuhan pada tahun 2016 Ekspor non migas meningkat sebesar 9,9 persen dan Pertumbuhan Impor non migas pada tahun 2016 akan tumbuh sebesar 7,1 persen.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan perekonomian sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,42 persen.

**Gambar 3.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan**



#### Tahun 2009-2013

*Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 sebesar 6,52 persen didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor pembentuknya. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2013 adalah sektor konstruksi. Pertumbuhan sektor konstruksi tahun 2013 sebesar 9,09 persen. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor konstruksi tahun 2012 yang hanya tumbuh sebesar 8,28 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi tahun 2013 didukung oleh adanya proyek pembangunan/perbaikan jalan yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi jalan negara, provinsi dan jalan kabupaten.

Selain itu didukung juga dengan adanya pembangunan rumah toko (ruko) yang mulai menjamur di Kabupaten Bengkulu Selatan

Sektor kedua yang mengalami pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor konstruksi yaitu sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 8,43 persen di tahun 2013. Pertumbuhan sektor jasa-jasa tahun 2013 sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,34 persen. Pertumbuhan sektor jasa-jasa didukung oleh pertumbuhan sub-sektor pemerintahan umum dan swasta. Jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sub-sektor pemerintahan umum tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 8,92 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,34 persen. Sub-sektor jasa swasta tahun 2013 mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan sub-sektor pemerintahan umum. Sub-sektor jasa swasta tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 7,52 persen di tahun 2013. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2013 lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2012 yang sebesar 7,99 persen. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh pertumbuhan sub-sektor pembentuknya. Subsektor yang tercakup dalam sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor pengangkutan dan subsektor komunikasi. Untuk subsektor pengangkutan, kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dari angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan saja. Sub-sektor pengangkutan tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Sedangkan untuk tahun 2012 sub-sektor pengangkutan mengalami pertumbuhan sebesar 8,21 persen. Kegiatan angkutan jalan raya tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,27 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 8,18 persen. Kegiatan angkutan jalan raya mengalami trend positif seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat yang digunakan untuk pengangkutan barang maupun penumpang apalagi hal itu dipermudah dengan sistem pembayaran kredit. Kegiatan jasa penunjang angkutan tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,36 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 12,42 persen. Sub-sektor komunikasi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana laju pertumbuhannya sebesar 11,55 persen dibandingkan tahun 2012 yang hanya 4,44 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengguna komunikasi seperti penggunaan telepon genggam/ seluler dan internet.

Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 7,32 persen di tahun 2012 lebih lambat dibandingkan tahun 2011 sebesar 7,55 persen. Sub-sektor bank tumbuh sebesar 8,42 persen lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,51 persen. Sub sektor lembaga keuangan selain bank tumbuh 7,64 persen, sub sektor real estat tumbuh sebesar 7,13 persen, dan jasa perusahaan meningkat sebesar 11,11 persen.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar kelima setelah sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sektor industri pengolahan tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,24 persen. Pertumbuhan sektor industri tahun 2012 lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,02 persen. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya bersumber dari subsektor industri bukan migas. Pertumbuhan sub-

sektor industri bukan migas paling besar berada pada kelompok komoditi kertas dan barang cetakan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,42 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan ini lebih lambat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 11,1 persen. Pada sub-sektor industri bukan migas ini hampir semua kelompok komoditas mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya kecuali kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami pertumbuhan sebesar 9,3 persen di tahun 2012 dan 11,74 di tahun 2011.

Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 6,45 persen di tahun 2012. Pertumbuhan ini sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 6,3 persen. Sektor pertambangan dan penggalian ini hanya bersumber dari subsektor penggalian, seperti misalnya usaha penggalian batu, pasir, dan batu hias di pantai ataupun di sungai.

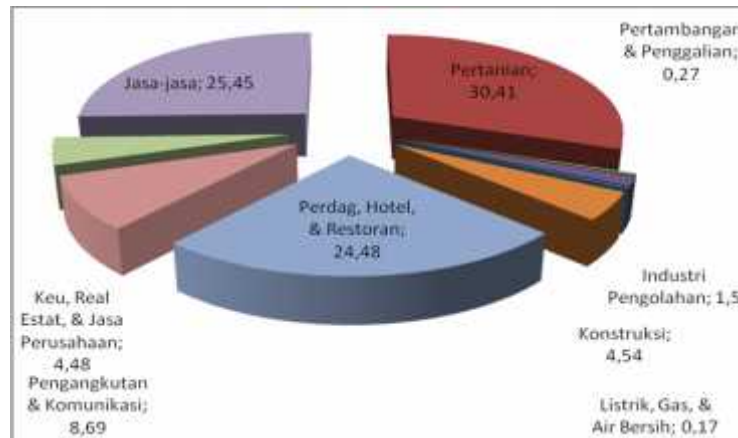
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan sektor pertanian tahun 2012 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 4,87 persen. Sub-sektor tanaman bahan makanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,18 persen bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,41 persen. Sub-sektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan sebesar 7,26 persen, sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,99 persen, sub-sektor kehutanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,16 persen, dan sub-sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen pada tahun 2012. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran sama seperti sektor jasa-jasa yaitu sama-sama mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen. Sub-sektor perdagangan dan sub-sektor hotel mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sub-sektor restoran/ rumah makan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sub-sektor restoran mengalami pertumbuhan sebesar 6,29 persen dan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 7,50 persen.

Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 2,47 persen pada tahun 2012. Sektor ini hanya bersumber dari subsektor listrik dan subsektor air bersih karena subsektor gas kota tidak tersedia di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih pada tahun ini lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,03 persen.

Pergerakan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh peranan sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga terbentuklah struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini juga menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonominya. Berikut ini peranan sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013.

**Gambar 3.3**  
**Peran Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2013**



*Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014*

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 2000 - 2013 hanya mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 2013, struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan masih berbasis pada sektor pertanian, kemudian urutan kedua disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran, urutan ketiga sektor jasa-jasa. Ketiga sektor ini memiliki peran 80,34 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan 19,66 persennya tersebar di sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik, gas, dan air bersih.

Sektor pertanian memiliki peranan yang paling tinggi dalam menciptakan nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 30,41 persen. Walaupun sektor pertanian memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi sektor ini memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah dan masih didominasi oleh tenaga kerja tidak dibayar/ pekerja keluarga. Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2013 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 58,6 persen. Pemerintah patut memberikan perhatian yang serius dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Peranan sektor pertanian dari tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan. Peranan sektor pertanian dari tahun 2011 - 2013 berturut turut sebesar 32,99 persen, 31,69 persen dan 30,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi sedikit pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian

Sektor jasa memiliki peranan tertinggi kedua dalam perekonomian setelah sektor pertanian. Peranan sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2012 sebesar 25,45 persen, sedikit lebih besar dibandingkan tahun 2011 sebesar 24,53 persen.

Setelah sektor pertanian dan jasa - jasa , sektor berikutnya yang memiliki peranan tertinggi yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Peranan sektor ini dalam menciptakan nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 24,48 persen. Dalam tiga



tahun terakhir peranan sektor jasa-jasa yaitu sebesar 24,62 persen di tahun 2009; 24,71 persen di tahun 2010; dan 24,5 persen di tahun 2011.

Sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor keempat terbesar yang berperan dalam menyumbang nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 8,69 persen. Peranan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 8,40 persen.

Sektor konstruksi memiliki peranan menyumbang nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 4,54 persen di tahun 2012. Sektor konstruksi mengalami trend yang positif dalam peningkatan peranannya dari tahun 2008 - 2011.

Sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan memiliki peranan dalam menyumbang nilai tambah perekonomian sebesar 4,48 persen pada tahun 2012. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,46 persen.

Sektor industri pengolahan menyumbang nilai tambah perekonomian tahun 2012 sebesar 1,5 persen. Peranan sektor industri ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peranan sektor industri dari tahun 2010 - 2012 berturut-turut sebesar 1,41 persen, 1,43 persen dan 1,5 persen.

Sektor pertambangan dan penggalan tahun 2012 memiliki peranan sebesar 0,27 persen. Peranan sektor pertambangan dan penggalan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,28 persen.

Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang paling kecil peranannya dalam menyumbang nilai tambah perekonomian pada PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan. Sektor listrik, gas, dan air bersih hanya memiliki peranan sebesar 0,17 persen pada tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya, besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.1**  
**Peranan Masing-Masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2008-2012 (%)**

No	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	33,65	32,99	31,69	30,41	30,54
2.	Pertambangan & Penggalan	0,29	0,30	0,28	0,27	0,30
3.	Industri Pengolahan	1,41	1,43	1,50	1,50	1,57
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	0,18	0,18	0,18	0,17	0,14
5.	Konstruksi	4,36	4,43	4,46	4,54	5,12
6.	Perdag, Hotel, & Restoran	24,62	24,71	24,50	24,48	26,12
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,17	8,05	8,40	8,69	8,11
8.	Keu, Real Estat, & Jasa Perusahaan	4,60	4,49	4,46	4,48	5,02
9.	Jasa-jasa	22,71	23,42	24,53	25,45	23,09
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

## 2. PRDB Per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan per kapita penduduk, yaitu dengan cara membagi nilai total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun baik menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka ini merupakan salah satu indikator untuk melihat



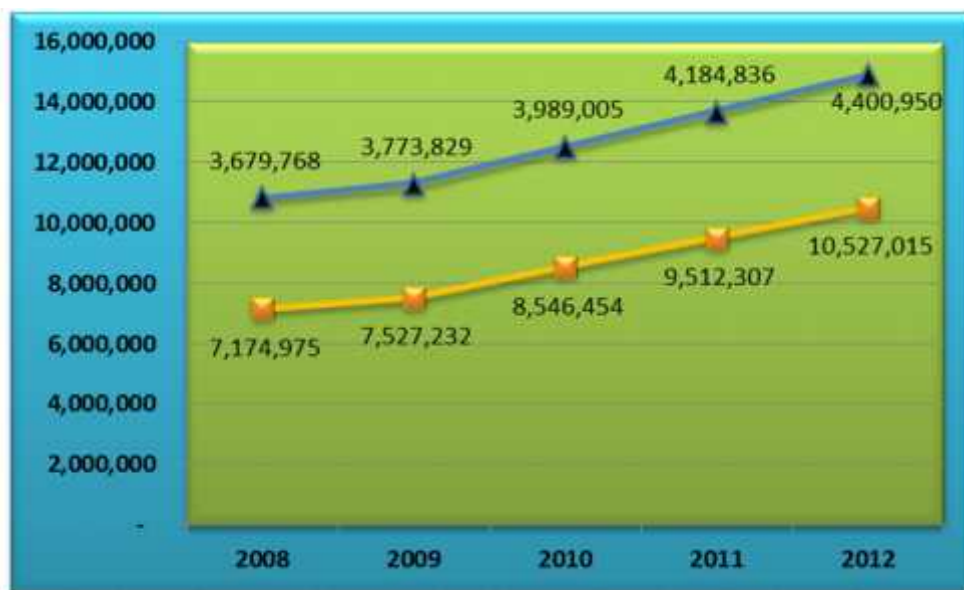
tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp 10.527.015 yang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 9.512.307. Kenaikan PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 21,18 persen ini hanya menunjukkan kenaikan pendapatan secara nominal saja dan belum bisa menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat ataupun produksi riil karena kenaikan tersebut masih dipengaruhi adanya kenaikan harga.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kenaikan sebesar 5,16 persen terhadap tahun 2011 yaitu dari Rp 4.184.836 menjadi Rp 4.400.950. Kenaikan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2012 ini menunjukkan kenaikan produksi secara riil sebesar 5,16 persen tanpa dipengaruhi kenaikan harga.

PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan selama tahun 2008-2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat gambar berikut:

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2008-2012**



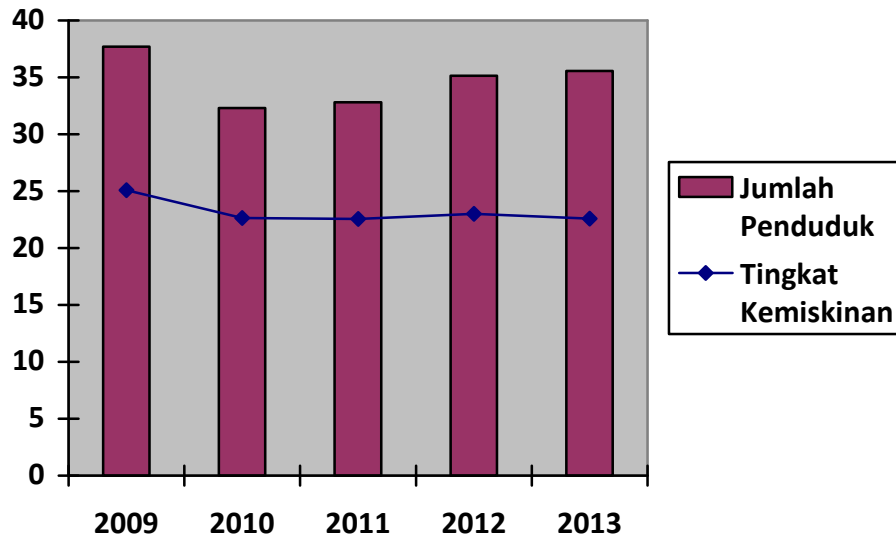
Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014

### 3. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan menduduki peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 tercatat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 22,87 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 32.817 jiwa. Angka tersebut menunjukkan trend peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yaitu sebesar 22,55 persen.

Kondisi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.5**  
**Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2009-2013**



*Sumber: TKPKD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014*

#### **B. Perkiraan Tahun 2017**

Kondisi ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 diperkirakan mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan PDRB yang terus menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Perkiraan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 adalah:

- 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 6,6 – 6,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,52%. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor-sektor utama penyumbang PDRB masih akan menggeliat seperti sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa.
- 2) Adapun pendapatan perkapita pada tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan antara Rp. 10.527.015 – 11.447.128 rupiah.
- 3) Angka kemiskinan pada tahun 2016 diharapkan mengalami penurunan pada kisaran 21,92-21,20 persen.

#### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017**

Pertumbuhan perekonomian daerah merupakan hal yang mutlak harus dicapai dan harus diemban oleh para pemangku kepentingan pembangunan daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menghasilkan solusi menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dan cenderung menghambat pertumbuhan perekonomian daerah. Disamping itu, analisis terhadap kondisi perekonomian secara global juga harus dipertimbangkan terkait lesunya perekonomian di Eropa, karena pasti akan berimbas pada perekonomian secara nasional dan Lebih jauh lagi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan perekonomian daerah.

##### **a. Tantangan**

Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2016 dan tahun 2017 diantaranya :

- 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan baik itu sumber daya manusia aparatur (Pegawai Negeri Sipil) maupun masyarakat pada umumnya yang bergerak pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Rendahnya kualitas SDM aparatur mempengaruhi pencapaian optimalisasi dan profesionalitas kinerja birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan layanan bagi masyarakat. Sedangkan rendahnya kualitas masyarakat yang bergerak pada sektor-sektor potensial menghambat penciptaan peluang-peluang atau inovasi baru yang menopang peningkatan perekonomian daerah.
- 2) Reformasi Birokrasi dan penciptaan tata kelola birokrasi yang baik belum tercipta secara optimal sehingga upaya menuju *clean governance* dan *good government* masih belum bisa berjalan sehingga berpengaruh pada lambannya peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
- 3) Usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang notabene sebagai basis atau pondasi perkuatan perekonomian daerah, belum mendapatkan perhatian dan pengembangan dari Pemerintah Daerah. Selain itu potensi pariwisata dan perdagangan/jasa masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
- 4) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) masih kurang maksimal sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas manusia, barang dan jasa serta lalu lintas hasil produksi daerah baik dari dan keluar daerah tidak optimal.
- 5) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan belum berkembang.
- 6) Belum digalinya potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber PAD bagi Daerah, perlu nya studi banding ke daerah yang sudah maju sehingga Potensi PAD dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- 7) Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 8) Masih belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana mengingat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah rawan bencana.

#### **b. Prospek Perekonomian Daerah**

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata yang sampai saat ini belum dikelola dengan maksimal. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah harus mulai memberikan porsi yang lebih besar dalam pengembangan dan pengolahan sektor-sektor yang potensial tersebut.

Prospek perekonomian daerah yang berpotensi untuk dikembangkan pada tahun mendatang antara lain :

- 1) Sektor Pertanian yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang beberapa tahun terakhir telah menyumbang PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan paling besar dibandingkan sektor lain, ke depan masih dapat dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian daerah, dengan program dan kegiatan antara lain pengembangan perikanan, perkebunan dan pengelolaan kehutanan.

- 2) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2016 diperkirakan masih akan menjadi sektor penyumbang PDRB yang cukup signifikan setelah sektor pertanian. Hal ini karena geliat perdagangan sudah terlihat dengan semakin banyaknya rumah-rumah toko yang dibangun, banyaknya hotel yang berdiri serta usaha restoran yang juga menjamur di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3) Potensi pariwisata yang belum dikembangkan secara maksimal, diantaranya Pantai Pasar Bawah, Pantai Bengkenang, Air Terjun Cawang, Air Terjun Geluguran, Goa Suruman dan masih banyak lagi.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan perimbangan.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan selama 3 (Tiga) tahun terakhir (Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016) memperlihatkan bahwa terdapat komponen kondisi dimana terjadi pertumbuhan/penurunan proporsi sumber pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja, proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan.

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi karena salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum mampu menggali potensi dan peluang pendapatan secara optimal. Pengelolaan dan penggalan sumber-sumber yang berpotensi mendatangkan pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan jalan ekstensifikasi dan intensifikasi, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan kerangka pendanaannya beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada luncturan dana dari Pemerintah Pusat. Pada tahun yang akan datang diperkirakan keuangan daerah masih akan tetap bergantung pada luncturan dana perimbangan dari pusat baik itu melalui mekanisme Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dana Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium) di masa yang akan datang, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini data realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 s/d 2016.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2014 s/d 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2014 (n-3)	Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/ Target pada tahun rencana (n)	Proyeksi/ Target pada tahun (n+1)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	18.795.419.858,63	36.083.664.847,96	40.021.160.689,96	44.023.276.758,96	48.425.604.434,85
1.1.1	Pajak Daerah	3.082.430.000,00	3.714.920.000,00	4.219.020.000,00	4.640.922.000,00	5.105.014.200,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.314.562.060,00	19.243.812.830,00	21.870.661.600,00	24.057.727.760,00	26.463.500.536,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	1.867.726.750,63	3.436.959.709,96	3.436.959.709,96	3.780.655.651,00	4.158.721.249,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.530.701.048,00	9.687.972.308,00	10.494.519.380,00	11.543.971.318,00	12.698.368.449,80
1.2	Dana Perimbangan	510.898.088.571,00	556.557.163.360,00	605.517.326.000,00	666.069.058.600,00	732.675.964.460,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	20.360.573.571,00	16.620.435.360,00	28.249.994.000,00	31.074.993.400,00	34.182.492.740,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	444.045.665.000,00	490.436.878.000,00	511.116.682.000,00	562.228.350.200,00	618.451.185.220,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.491.850.000,00	49.499.850.000,00	66.150.650.000,00	72.765.715.000,00	80.042.286.500,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.458.261.263,91	104.042.859.200,00	119.927.245.694,00	131.919.970.263,40	145.111.967.289,74
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	12.233.476.263,91	12.233.476.200,00	11.565.382.769,00	12.721.921.045,90	13.994.113.150,49
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi, pemerintah daerah lainnya	3.787.200.000,00	2.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.3.5	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	56,437,585,000,00	89.809.383.000,00	108.361.862.925,00	119.198.049.217,50	131.117.854.139,25
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>552.128.920.442,09</b>	<b>696.683.687.407,96</b>	<b>765.465.732.383,96</b>	<b>842.012.305.622,36</b>	<b>926.213.536.184,59</b>

Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2016

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah dapat dijadikan sebagai panduan atau kerangka dasar dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ini penting disusun dengan tujuan agar setiap kebijakan yang nantinya dihasilkan selalu berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Optimalisasi asset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk memberdayakan BUMD yang sudah ada secara optimal.
3. Melakukan reformasi regulasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan mempunyai dasar legalitas yang jelas.
4. Melakukan pendataan dan sosialisasi dalam bidang pendapatan daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- 5.
6. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pendapatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di unit teknis terkait.

7. Pengelolaan dan pengembangan serta pembangunan potensi daerah terutama sumber daya alam yang belum tergali dan terkelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan terus dilakukannya upaya penyempurnaan di bidang pengelolaan keuangan, dimana masyarakat semakin menuntut adanya keuangan publik yang transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, mendasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi.

Secara umum gambaran realisasi dan proyeksi/target belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2013 s/d 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi tahun 2013 (n-3)	Realisasi Tahun 2014 (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/ Target pada tahun rencana (n)	Proyeksi/ Target pada tahun (n+1)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	352.743.898.446,04	406.289.083.566,74	454.616.315.340,00	500.077.946.874,00	545.539.578.408,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-			
2.1.3	Belanja Subsidi	-	761.376.000,00	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	1.933.200.000,00	14.857.330.000,00	18.050.000.000,00	19.855.000.000,00	21.660.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.666.800.000,00	4.639.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	240.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.390.000.000,00	3.390.000.000,00	17.033.992.525,00	18.737.391.777,00	20.440.791.030,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	498.574.700,00	348.574.700,00	600.000.000,00	660.000.000,00	720.000.000,00
	Jumlah	362.232.473.146,04	430.285.364.266,74	490.500.307.865,00	560.698.144.451,00	611.670.703.038,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	37.485.093.100,00	47.544.953.650,00	47.713.693.000,00	52.485.062.300,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.524.438.818,00	131.942.366.311,00	122.401.157.651,00	134.641.273.416,00	
2.2.3	Belanja Modal	121.295.656.640,00	142.580.860.674,00	167.535.678.354,00	184.092.461.689,40	
	Jumlah	274.305.188.558,00	322.068.180.635,00	337.650.529.005,00	371.218.797.405,50	

Sumber : Data yang diolah, Tahun 2016



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran belanja aparatur masih mendominasi belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan dengan anggaran belanja pelayanan publik. Hal ini terlihat jelas dimana lebih dari 50% dari total belanja daerah diserap oleh belanja pegawai dalam hal ini membayar gaji. Kondisi ini berimplikasi terhadap anggaran untuk belanja pelayanan masyarakat dalam porsi yang tidak terlalu besar.

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi; angsuran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Berikut ini dapat digambarkan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun 2013 s/d 2016**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH				
		Realisasi tahun 2013 (n-3)	Realisasi Tahun 2014 (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/ Target pada tahun rencana (n)	Proyeksi/ Target pada tahun (n+1)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	34,024,048,711.16	27.904.391.879,58	33,358,522,913.00	34,359,278,600.39	35,390,056,958.40
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	37,375,041.00				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34,061,423,752.16	27.904.391.879,58	33,358,522,913.00	34,359,278,600.39	35,390,056,958.40
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) daerah	0,00				
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	1.188.061.005,59	1,832,736,294.00	1,887,718,382.82	1,944,349,934.30
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah				-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	1.188.061.005,59	1,832,736,294.00	1,924,373,108.70	2,020,591,764.14
	PEMBIAYAAN BERSIH	34,061,423,752.16	26,716,330,873.99	31,525,786,619.00	32,434,905,491.69	33,369,465,194.27



## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan kajian terhadap berbagai aspek seperti kajian terhadap program prioritas Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan isu-isu strategis yang di daerah yang telah dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode masa kepemimpinan 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS”**.

Kalimat “EMAS” dalam visi tersebut merupakan kata kunci yang menjadi kontrak politik yang harus diwujudkan. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” adalah Mewujudkan Bengkulu Selatan yang partisipatif, aspiratif dan merata untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera. Elok merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang di bentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal. Maju mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang. Aman adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan masyarakat. Sejahtera merupakan suatu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam rangka pencapaian tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan tersebut, disusun misi, tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan nantinya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai visi Pemerintah Daerah.

Berikut ini disajikan misi, tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah di *breakdown* dari visi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah:

**Tabel 4.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>Visi 1 : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS ( Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)</b>			
<b>Misi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>I</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
	2. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	2. Peningkatan tata kelola keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi	1. Peningkatan komitmen pemerintah Daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi
	4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik ( e government)	5. Meningkatkan keterbukaan informasi public sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi	1. Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat
6. Meningkatkan kinerja Pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	6. Peningkatan dan perluasan pelayanan public yang berkualitas dan berdaya saing	1. Peningkatan standar kualitas pelayanan prima
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	7. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesionalisme melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur	1. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kaulifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan
8. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil Negara	8. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur	1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur
9. Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah	1. Penguatan sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Penyelenggaraan pemerintah Dearah.

Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
II Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	2. Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitasi peningkatan budaya baca masyarakat.
	<p>2. Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas</p>	<p>2. Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat</p> <p>4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan di semua lembaga pelayanan kesehatan</p>	<p>1. Peningkatan standar pelayanan pendidikan</p> <p>1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan</p> <p>2. Penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas</p>

	5. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	5. Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja	1. Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas 2. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>III.</b> Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten</p> <p>2. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pemukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah</p>	<p>1. Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>2. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pemukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan</p> <p>3. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan</p>	<p>1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>1. Peningkatan layanan perumahan, air, minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas</p> <p>1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian</p>

	<p>4. Meningkatkan kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana</p>	<p>4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>	<p>1. Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah</p> <p>2. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan</p> <p>1. Peningkatan bimbingan, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana</p>
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
IV Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, Industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal	<p>Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal</p> <p>Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan</p> <p>Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal</p>
	Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Meningkatkan kualitas dan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

	<p>Menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin</p> <p>Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat</p> <p>Meningkatnya investasi daerah</p>	<p>Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial</p> <p>Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing</p> <p>Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang profesional</p>	<p>Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata</p> <p>Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata</p> <p>Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional</p>
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p><b>V</b> Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan</p>	<p>Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan</p>	<p>Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat</p> <p>Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan</p>	<p>Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah</p> <p>Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian</p>



			<p>Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan</p> <p>Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan</p> <p>Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya</p>
			<p>Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan</p>
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>VI. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah</p>	<p>Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda</p> <p>Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba</p> <p>Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga</p> <p>Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan</p>

<p><b>VII</b> Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal</p>	<p>Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong</p> <p>Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati</p> <p>Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan</p> <p>Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat</p> <p>Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal</p>	<p>Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik</p> <p>Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan</p> <p>Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat</p> <p>Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan</p> <p>Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan.</p>
--	---	---	--

Berdasarkan Strategi dan arah Kebijakan diatas maka dapat dijabarkan tujuan sasaran dan prioritas RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan yang sejalan dengan Tujuan, Sasaran dan Prioritas dari Provinsi sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ( <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> ).	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	Meningkatnya opini audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK dari WDP ke WTP
		Meningkatkan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dari tahun ke tahun oleh BPK
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
2	Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan Kemandirian dalam pembangunan daerah	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan Pendapatan Daerah
		Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Terwujudnya desa maju mandiri
3	Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan SDM yang berkualitas	Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan
			Minimalisasi resiko bencana
			Peningkatan perekonomian masyarakat
			Meningkatnya rata2 lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
			Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
			Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah, Meningkatkan APK PT usia 19-23 tahun serta Menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan masyarakat
			Meningkatnya umur harapan hidup, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, Menurunnya prevalensi kekurangan gizi
			Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan
			Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
4	Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan local	Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang demokratis dan harmonis	Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif
			Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah
			Menumbuhkembangkan iklim yang harmonis dalam masyarakat
		Mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang religious	Menumbuhkan pemahaman keagamaan
			Meningkatkan aktifitas keagamaan
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan local	Meningkatnya minat masyarakat dan peran lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya local

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan daerah adalah program pembangunan yang telah dipilih dan ditetapkan dalam urutan tertinggi skala prioritas diantara banyak program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah. Program prioritas diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Tabel 4.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Program	SKPD
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya opini audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK dari WDP ke WTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selesaiannya tindak lanjut temuan BPK terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Terpenuhinya jasa keuangan</li> <li>Terlaksananya Sertifikasi Tanah</li> </ul>	90%  90% 75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program Penataan dan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</li> </ul>	Dinas PPKAD  Dinas PPKAD
		Meningkatnya Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dari tahun ke tahun oleh BPKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD semakin baik</li> <li>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>	90% 90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	Bagian Tata Pemerintahan Setda Perubahan
		Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur meningkat</li> <li>Produktivitas SDM meningkat</li> </ul>	80% 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</li> </ul>	BKD Semua SKPD
		Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</li> <li>Tercapainya Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik</li> </ul>	75% 75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> </ul>	Bagian Pembangunan Dinas Dukcapil
2	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan rata2 lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kesehatan dan pendidikan Meningkatkan umur harapan hidup, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, Menurunnya prevalensi kekurangan gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan dan pemerataan akses pendidikan</li> <li>Akses pendidikan dan kesehatan semakin luas dan berkualitas</li> <li>Tercetaknya siswa-siswi berprestasi</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang berkualitas</li> </ul>	80% 80% 75% 85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pendidikan anak usia dini</li> <li>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>Program Pendidikan Menengah</li> <li>Program Pendidikan Non Formal</li> <li>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	Dinas Dikpora Dinas Kesehatan RSUD HD Manna

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Program	SKPD
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</li> <li>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</li> </ul>	
3	Revitalisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan	Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, berkurangnya hama babi, meningkatnya motivasi petani dalam pengendalian OPT</li> <li>Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan</li> <li>Dokumen Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan</li> </ul>	80%   80%  1 dok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> <li>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> </ul>	Dinas Pertanian  Bappeda  Bappeda
4	Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika)	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase</li> <li>Kualitas sarana dan prasarana kebinamargaan</li> <li>Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya</li> </ul>	5 paket  75%  75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</li> <li>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</li> <li>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</li> </ul>	Dinas PU  Dinas Perhubungan

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Program	SKPD
5	Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan perekonomian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda penggerak Perekonomian masyarakat</li> <li>Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi</li> <li>meningkatnya efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</li> <li>sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan</li> </ul>	80%  75%  85%  75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>Program Pengembangan Kewirausahaan dan</li> <li>Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>Program perencanaan pembangunan ekonomi</li> </ul>	Dinas Koperindag     Bappeda
6	Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan  Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam  Pemanfaatan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam  Minimalisasi resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan</li> <li>Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan</li> <li>Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten</li> <li>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang</li> </ul>	1 dok  85%  1 dok  75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>Program Pemanfaatan Ruang</li> <li>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> </ul>	Bappeda Dinas PU Dinas Pertanian   Kantor Lingkungan Hidup  Kantor Lingkungan Hidup  BPBD



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Program	SKPD
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</li> </ul>	
7.	Peningkatan peran dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan keluasan akses terhadap pendidikan</li> <li>Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan</li> <li>Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gender</li> <li>Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Kesehatan</li> <li>Meningkatnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public</li> </ul>	80% 75% 75% 75% 75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</li> <li>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</li> </ul>	Badan PPKB
8.	Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	Berkembangnya pariwisata kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi pariwisata menjadi destinasi wisata</li> <li>Promosi pariwisata dan kebudayaan daerah</li> </ul>	2 lokasi 75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> </ul>	Dinas Perhubungan
9.	Politik, hukum dan ketertiban umum	Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan</li> <li>Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah</li> <li>Meningkatnya peran pemerintah dan peran serta organisasi keagamaan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religious</li> </ul>	75% 75% 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pendidikan politik masyarakat</li> <li>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</li> <li>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</li> <li>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> </ul>	Kantor Kesbangpol Satpol PP Sekretariat DPRD Dinas Perhubungan

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Program	SKPD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya minat masyarakat dan peran lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya local</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan pelayanan kehidupan Beragama</li> <li>Program perencanaan sosial budaya</li> <li>Program kemitraan pengembangan wawasan Kebangsaan</li> <li>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</li> </ul>	

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS KEGIATAN**

Rencana program dan prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diselaraskan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah dirumuskan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya. Sedangkan kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung program dan kegiatan.

Berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, dimana telah ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan
4. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika)
5. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
7. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan
8. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
9. Politik, hukum dan ketertiban umum

Prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan akselerasi atau percepatan pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Beberapa prioritas pembangunan di tahun 2016 antara lain:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta layanan kesehatan dan pendidikan
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan tata kelola pemerintahan guna mendukung pencapaian reformasi birokrasi
3. Pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Pembangunan sektor pertanian melalui peningkatan pengelolaan pertanian dan perkebunan
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terutama perempuan dalam pembangunan menuju tercapainya pembangunan berbasis gender

Dalam rangka melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan alokasi pendanaan yang sesuai dengan memperhatikan skala prioritas agar pembangunan yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan per SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini dan rencana program dan prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dituangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pagu	SKPD
1. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana serta layanan kesehatan dan pendidikan	1. Meningkatnya rata 2 lama sekolah Penduduk berusia 15 tahun keatas	Jumlah penduduk sekolah berusia 15 tahun keatas	Program Pendidikan Menengah	Rp. 10.103.496.000,-	DIKPORA
			Program Pengembangan Anak Usia Dini	Rp. 8.580.895.650,-	DIKPORA
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	PERPUSTAKAAN
	2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas	Jumlah Penduduk tidak buta aksara berusia 15 tahun keatas	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidikan	Rp. 259.072.900,-	DIKPORA
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 34.390.727.480	DIKPORA
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 966.355.150,-	DIKPORA

	3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah, Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun serta menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pusat	Persentase APM. APK PT yang menurun	Program Pendidikan Menengah	Rp. 10.103.496.000,-	DIKPORA
			Program Pendidikan Tinggi	Rp. 966.354.350,-	DIKPORA
	4. Meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.759.000.000,-	DINKES
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 265.780.000,-	DINKES

	prevalensi kekurangan gizi		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 546.000.000,-	DINKES
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 257.500.000,-	DINKES
			Pogram Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 367.000.000,-	DINKES
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia	Rp. 564.000.000,-	DINKES
2.Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan tata kelola Pemerintahan guna mendukung pencapaian reformasi birokrasi	1. Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 987.000.000,-	DIKPORA
			Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 235.000.000,-	DIKPORA
	2. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar	Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp.452.980.000,-	SEKRT DPRD
			Program Peningkatan pelayanan kedinasan		

	pemerintah daerah dalam pembangunan daerah	menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah	kepala daerah/ wakil kepala daerah  Program Penataan Dearah Otonomi	Rp. 561.670.000,-  Rp. 458.000.000,-	SETDA  SETDA
3.Pembangunan dan Pengembangan serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar ( jalan, jembatan, dan irigasi) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrasruktur	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  Program Rehabilitasi/pemeliharaa n Jalan dan Jembatan  Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya  Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 66.350.000.000,-  Rp. 31.007.500.000,-  Rp. 20.450.000.000,-  Rp. 11.780.900.000,-	PU  PU  PU  PU
4.Pembangunan sektor pertanian melalui peningkatan pengelolaan pertanian dan perkebunan	1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan perkebunan		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp. 13.298.208.200,-	Dinas Pertanian



	2. Peningkatan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan  Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp. 185.000.000,-  Rp. 125.000.000,-	Dinas Pertanian  Dinas Peternakan
5.Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terutama perempuan dalam pembangunan menuju tercapainya pembangunan berbasis gender	1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan	Memberikan akses seluas luasnya bagi perempuan dalam pendidikan dan kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan  Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp. 540.750.000,-  Rp. 624.500.000,-	PP dan KB  PP dan KB



**Tabel 5.1**  
**Kebutuhan Pendanaan Indikatif Per SKPD**  
**di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan**

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	45.835.909.855	55.917.105.405
2	Dinas Kesehatan	18.643.648.280	21.042.087.620
3	Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna	23.121.686.000	66.713.144.200
4	Dinas Pekerjaan Umum	151.456.106.700.00	161.394.451.985
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.512.278.930	12.459.493.000
6	Dinas Perhubungan, Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata	4.261.200.000	4.261.200.000
7	Kantor Lingkungan Hidup	3.933.777.724	2.396.831.750
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.478.216.500	3.846.620.000
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	10.012.315.590	9.947.400.000
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.856.221.790	5.789.568.800
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.323.744.000	30.625.701.000
12	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	4.271.824.790	15.857.803.529
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.913.695.670	5.695.535.670
14	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	6.656.206.000	10.555.807.200
15	Sekretariat Daerah :	-	-
	- Bagian Umum	10.096.159.300	19.378.717.391
	- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	4.650.000.000	2.861.500.000
	- Bagian Ekonomi	825.000.000	825.000.000

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4
	- Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.440.000.000	1.440.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	1.960.451.160	1.960.451.160
	- Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	661.000.000	661.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.675.000.000	2.675.000.000
	- Bagian Keuangan	3.423.238.000	3.423.238.000
	- Bagian Humas, Protokol dan Santel	5.087.000.000	5.087.000.000
16	Sekretariat KORPRI	6.801.550.000	1.200.000.000
17	Sekretariat DPRD	32.878.387.250	28.754.861.900
18	Inspektorat	1.865.000.000	2.999.547.000
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.642.654.200	16.940.503.000
20	Badan Kepegawaian dan Diklat	5.339.000.000	7.658.432.300
21	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.561.662.883	1.561.662.883
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.853.729.000	4.615.879.000
23	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000
24	Dinas Pertanian	17.232.763.750	16.415.029.500
25	Kantor Ketahanan Pangan	944.435.600	1.561.049.160
26	Dinas Kehutanan dan ESDM	9.529.969.000	9.529.969.000
27	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)	1.794.500.000	4.444.788.000
28	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	4.304.906.980	14.625.000.000
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.454.741.025	6.495.013.025

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4
31	Penyelenggara Kecamatan :		
	1. Kecamatan Kota Manna	1.607.025.700	1.216.675.000
	2. Kecamatan Pasar Manna	2.079.500.000	1.902.085.000
	3. Kecamatan Manna	1.762.933.800	1.762.933.800
	4. Kecamatan Pino Raya	2.644.000.000	1.635.500.000
	5. Kecamatan Pino	2.247.440.000	2.247.440.000
	6. Kecamatan Ulu Manna	1.962.800.000	908.782.300
	7. Kecamatan Seginim	2.050.913.997	966.836.570
	8. Kecamatan Air Nipis	2.275.464.320	2.651.134.580
	9. Kecamatan Bunga Mas	1.808.300.000	1.639.000.000
	10. Kecamatan Kedurang Ilir	2.375.917.500	2.624.000.420
	11. Kecamatan Kedurang	2.967.948.880	2.944.667.420
	TOTAL	501,184,180,274.	514.193.968.503

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2021	2021
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
<b>A.1</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>			
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,34	6,15	6,15
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	6,6	6,3	6,3
3	PDRB per kapita (Rp)	28,4	39,4	39,4
4	IPM	69,4	71,8	71,8
	<b>Pendidikan</b>			
<b>A.2</b>	<b>Kesejahteraan Sosial Pendidikan</b>			
5	Angka Melek huruf (%)	96.9-97.9	100	100
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.95	9.62	9.62
7	Angka partisipasi murni	91.35	91.72	91.72
	SD	98,6	100	100
	SLTP	82,3	100	100
8	Angka partisipasi kasar	99.22	99.62	99.62
	SD	100	100	100
	SLTP	88,3	90,0	90,0
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	13,60	15,60	15,60
	Jumlah Sekolah Terakreditasi			
	SD	113	124	124
	SMP			
	<b>Kesehatan</b>			
10	Angka kelangsungan hidup bayi	988	992	992
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	67,06	70,00	70,00
12	Persentase balita gizi buruk (%)	0,08	0	0

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2021	2021
1	2	3	4	5
	<b>Kemisikinan</b>			
	Angka Kemiskinan (%)	20,81	16,95	16,95
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	80,23	84,90	84,90
	<b>Kepemilikan Lahan</b>			
15	Persentase penduduk yang tidak memiliki lahan	-	-	-
	<b>Kesempatan Kerja</b>			
16	Rasio Penduduk yang bekerja	67,341	98,594	98,594
17	Pengangguran terbuka (%)	3,30	3,30	3,30
	<b>Kriminalitas</b>			
18	Angka kriminalitas yang tertangani	85	100	100
<b>A.3</b>	<b>Seni Budaya dan Olahraga</b>			
19	Jumlah Grup Kesenian	7	10	10
20	Jumlah Gedung kesenian	0	2	2
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
<b>B.1</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Pendidikan</b>			
	<b>Pendidikan Dasar</b>			
21	Angka partisipasi sekolah	99.74	99.78	99.78
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	71.30	72.10	72.10
23	Rasio Guru murid	0.05	0.08	0.08
	<b>Pendidikan Menengah</b>			
24	Angka partisipasi sekolah	98.99	98.99	98.99
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.44	0.44	0.44
26	Rasio Guru murid	0,07-0,080	0,07-0,080	0,07-0,080
	<b>Kesehatan</b>			
27	Rasio posyandu per satuan balita	1:71	1:55	1:55
28	Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas persatuan penduduk	1:1359	1:1330	1:1330
29	Rasio dokter persatuan penduduk	0,034	0,046	0,046
30	Rasio tenaga medis persatuan penduduk			
	- Bidan	0.206	0.226	0.226
	- Perawat	0.277	0.297	0.297
31	Jumlah Puskesmas terakreditasi	2	14	14
	<b>Sarana dan Prasarana Umum</b>			
32	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik(Jln Kab B/S )	0	80-90	80-90
32	Jumlah Tempat Ibadah persatuan penduduk	0,233687	0,245987	0,245987

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2021	2021
1	2	3	4	5
	<b>Perhubungan</b>			
33	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1
<b>B.2</b>	<b>Pelayanan Penunjang</b>			
	<b>Penanaman Modal</b>			
34	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	72	80	80
35	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	2	5	5
	<b>KUKM</b>			
36	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	13-14	17-18	17-18
37	Jumlah Koperasi Non KUD	202-204	210-212	210-212
38	Jumlah UMKM non BPR/LKMUUKM	1234-1239	1249-1255	1249-1255
39	Jumlah BPR	0	3	3
	<b>Ketenagaan Kerja</b>			
40	Angka partisipasi angkatan kerja	71-75	90-95	90-95
	<b>KB dan KS</b>			
41	Jumlah Pasangan Usia Subur	32439	34551	34551
42	Jumlah Peserta KB	25,791-26,048	26,829-27,086	26,829-27,086
	<b>Pertanahan</b>			
43	Persentase Luas lahan bersertifikat	40-45	60-65	60-65
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
44	Jumlah LSM	-	-	-
	<b>Perpustakaan</b>			
45	Jumlah Perpustakaan	229	241	241
46	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1833-2016	2684-2952	2684-2952
	<b>Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>			
47	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4/10.000	30/10.000	30/10.000
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>C.1</b>	<b>Kemampuan ekonomi Daerah</b>			
48	Angka konsumsi RT per kapita	64.81-68.05	78.78-82.72	78.78-82.72
49	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	40.18-42.19	48.84-51.28	48.84-51.28
50	Produktifitas 9 sektor PRDB	4.7-4.9	5.7-6	5.7-6
51	Pertanian	379,481-398,455	461,262-484,325	461,262-484,325
52	Pertambangan dan penggalan	3,326-3,492	4,043-4,245	4,043-4,245
53	industri pengolahan	16,007-16,807	19,456-20,429	19,456-20,429
54	Listrik	2,054-2,157	2,497-2,622	2,497-2,622
55	Bangunan	49,320-51,786	59,949-62,946	59,949-62,946



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2021	2021
1	2	3	4	5
56	Perdagangan	278,127-292,087	338,127-355,034	338,127-355,034
57	Pengangkutan dan komunikasi	92,290-96,905	112,180-117,789	112,180-117,789
58	Keuangan	52,013-54,614	63,223-66,384	63,223-66,384
59	Jasa-jasa	256,604-269,434	311,904-327,499	311,904-327,499
<b>C.2</b>	<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>			
	<b>Aksesibilitas Daerah</b>			
60	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-
61	Panjang Jalan	764,20-840,62	1.118,87-1.230,76	1.118,87-1.230,76
	<b>Fasilitas Bank</b>			
62	Jumlah Bank	15-17	15-21	15-21
	<b>Fasilitas Listrik</b>			
63	Jumlah RT yang menggunakan listrik	26.750-28.088	26.750-28.088	26.750-28.088
	<b>Ketersedian Penginapan</b>			
64	Jumlah Penginapan/Hotel	17	21	21
	<b>Iklim Berinvestasi</b>			
65	Angka kriminalitas	255-230	166-150	166-150
66	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	152-159	185-194	185-194
67	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	26-23	17-15	17-15
68	<b>Sumber Daya Manusia</b>			
69	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	228-251	334-368	334-368
70	Rasio Ketergantungan	-	-	-

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013. RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017.

RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 disusun dengan mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang dimulai dari kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Secara substantif, RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 menguraikan tentang :

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon dana SKPD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Daftar prioritas kegiatan yang telah dipilah dan dipilih menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan diusulkan ke APBD Provinsi dan APBN;
3. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama yang dananya berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Bengkulu Selatan dan bantuan keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan kepada pemerintahan desa.

Dengan dokumen RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal yang akhirnya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terealisasi dengan baik.

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

**ttd**

**H. DIRWAN MAHMUD**

